

Statistik Gender dan Analisis di Kabupaten Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara

ISBN: 979-724-072-X

No. Publikasi: 04210.0312

Katalog BPS: 4720.7403

Ukuran Buku: 15 cm x 21 cm

Jumlah Halaman: 94 halaman

Naskah:

- BPS Kabupaten Kendari
- Badan Pusat Statistik

Gambar Kulit:

- BPS Kabupaten Kendari

Diterbitkan oleh:

- Badan Pusat Statistik, Jakarta - Indonesia
- JICA

Dicetak oleh:

CV Nasional, Jakarta

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya



SAMBUTAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Dengan diterbitkannya buku Profil Statistik dan Indikator Gender ini, Alhamdulillah, sebanyak 29 provinsi di Indonesia sudah selesai ditulis untuk dipublikasikan. Di samping terdapat 8 kabupaten dari 8 provinsi, juga telah dapat diselesaikan. Keberhasilan itu merupakan hasil kerjasama yang baik antara Badan Pusat Statistik, Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan Pusat Studi Wanita serta Pemerintah Daerah yang sebagian didukung pendanaannya oleh JICA (Jepang) dan APBN (pemerintah Indonesia). Masih ada satu provinsi yang belum dapat diselesaikan karena kesulitan masalah ketersediaan data.

Data dan informasi ini sangat penting perannya dalam manajemen modern, karena perencanaan dan pelaksanaan program tanpa didukung oleh data dan informasi sangat sukar untuk dipantau dan dievaluasi efektivitasnya. Dari data basis yang ada dapat dikembangkan indikator tentang ukuran keberhasilan yang ingin dicapai.

Buku Statistik Gender dan Analisis ini merupakan upaya untuk memfasilitasi pemerintah daerah dalam menentukan dan merencanakan skala prioritas pembangunan pemberdayaan perempuan sehingga hasilnya dapat lebih terukur. Data statistik ini masih memerlukan pemetaan tentang profil gender daerah secara sosio-kultural dan budaya sehingga determinasi aksi untuk perubahan dapat lebih terarah lagi. Karena itu, penerbitan buku profil statistik ini baru langkah awal dari upaya lebih lanjut untuk memberikan gambaran posisi dan kondisi perempuan di suatu wilayah.

Kepada semua pihak yang telah bekerja keras untuk menghasilkan buku ini, saya sampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan balasan yang setimpal atas jasa dan pengorbanannya.

Sekian,

Jakarta, Maret 2003
Menteri Pemberdayaan Perempuan

Hj. SRI REDJEKI SUMARYOTO, SH

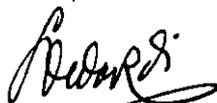
KATA PENGANTAR

Masalah kesenjangan gender sudah disadari sejak lama, tetapi data yang relevan dengan masalah tersebut belum lengkap sampai sekarang. Kesenjangan tersebut perlu diketahui untuk mengefektifkan pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan program-program yang belum berwawasan gender.

Publikasi "Statistik Gender dan Analisis di Kabupaten Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara" ini merupakan salah satu upaya untuk menyajikan data tentang perbedaan peran atau keadaan perempuan relatif terhadap laki-laki di berbagai bidang sosial ekonomi sehingga kebutuhan data yang terkait dengan masalah gender dapat terpenuhi. Data yang digunakan berasal dari hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS), LSM, dan instansi terkait lainnya.

Publikasi ini dibuat atas bantuan dana dari Japan International Cooperation Agency (JICA). Kepada semua pihak yang membantu dalam penyelesaian publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi pembaca.

Jakarta, Maret 2003
Kepala Badan Pusat Statistik



Dr. Soedarti Surbakti

TIM PENYUSUN

Penulis: **Sudia, SE**
Burhanuddin, SE
Nona Iriana, S. Si

Penyunting: **Drs. Johnny Anwar**

<https://sultra.bps.go.id>

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kesenjangan gender di Kabupaten Kendari yang digambarkan secara statistik berdasarkan data sekunder, baik yang berasal dari BPS maupun instansi terkait, terlihat sebagai berikut. Dalam bidang kependudukan, jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2000 lebih banyak dibandingkan perempuan, kecuali pada kelompok umur 20-34 tahun dan rata-rata setiap anak menjadi beban 2 orang wanita.

Kesenjangan gender dalam bidang pendidikan terlihat pada penduduk dewasa (10-44 tahun) yang buta huruf, partisipasi sekolah serta tingkat pendidikan yang ditamatkan. Kesenjangan gender pada partisipasi sekolah sudah tampak pada tingkat SLTP, sedangkan pada tingkat pendidikan yang ditamatkan baru terlihat pada tingkat SLTA.

Dalam bidang kesehatan kesenjangan gender terlihat pada tempat berobat, tenaga kesehatan, dan status gizi balita. Khusus untuk status gizi balita, kondisi gizi balita perempuan lebih baik dibandingkan balita laki-laki, kemungkinan karena balita perempuan lebih lama mendapat ASI (sekitar 1 bulan).

Berkaitan dengan sistem kekerabatan parental yang dianut suku terbesar di Kabupaten Kendari, maka sebagian besar kepala rumah tangga adalah laki-laki. Kondisi ekonomi rumah tangga yang dikepalai laki-laki lebih baik dibandingkan rumah tangga yang dikepalai perempuan. Hal ini ditunjukkan oleh lebih banyak anak usia sekolah di rumah tangga yang dikepalai laki-laki yang bersekolah dibanding di rumah tangga yang dikepalai perempuan, dan sumber penghasilan mereka bersumber dari sektor formal.

Peran laki-laki dalam ber-KB ternyata sangat kecil (kurang dari 1 persen). Sebaliknya, peran perempuan dalam dunia politik sangat kecil, hanya 7,5 persen. Begitu pula perempuan yang menjadi pejabat struktural maupun yang menduduki jabatan politis di bidang pemerintahan.

Kesenjangan gender pada kegiatan ekonomi pada umumnya sulit diperkecil, kemungkinan besar ini dipengaruhi oleh peran ganda perempuan baik reproduksi maupun produksi. Kesenjangan tersebut diperlihatkan oleh:

1. Rasio TPAK di daerah perkotaan maupun perdesaan relatif sama, yaitu 0,7 dan 0,8. Artinya bahwa di daerah perkotaan perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan yang dapat berperan di bidang ekonomi adalah 10 banding 7, sedangkan di daerah perdesaan perbandingan tersebut adalah 10 banding 8.
2. Tingkat pengangguran terbuka laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan baik di perdesaan maupun di perkotaan. Kemungkinan besar karena perempuan lebih suka atau terpaksa mengurus rumah tangga, sedangkan laki-laki akan terus berusaha mencari pekerjaan tanpa terbebani mengurus rumah tangga.
3. Perempuan yang bekerja di daerah perkotaan pada umumnya bekerja di sektor perdagangan, di mana proporsinya lebih banyak dibandingkan laki-laki (rasio pekerja = 1,4). Proporsi pekerja perempuan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki terdapat juga di sektor lainnya (gabungan sektor pertambangan, listrik, gas, dan air bersih, keuangan/persewaan dan jasa perusahaan).
4. Kesenjangan gender menurut status pekerjaan sangat mencolok. Proporsi pekerja perempuan yang tidak dibayar jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki, terutama di sektor pertanian.
5. Pekerja perempuan memperoleh upah yang lebih kecil dari pekerja laki-laki karena rata-rata jam kerjanya lebih pendek dari jam kerja laki-laki.

Banyaknya kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan ke Polisi di Kabupaten Kendari relatif sedikit. Hal ini mungkin karena masyarakat adat masih dapat memutuskan perkara dengan mekanisme budaya yang ada seperti denda, bila ada kejadian yang berkaitan dengan kekerasan, terutama untuk kasus pelecehan seksual.

Strategi pengarusutamaan gender menjadi semakin penting di era otonomi ini untuk mengarahkan pembangunan daerah agar tidak terlalu timpang pada orientasi pembangunan fisik semata, melainkan juga mempertimbangkan masalah kemanusiaan termasuk adanya keseimbangan gender dalam berbagai aktivitas pembangunan. Untuk itu diperlukan pemantauan berbagai bentuk kesenjangan peran dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki (kesenjangan gender) secara berkelanjutan, dan ini hanya dapat dilihat dengan menggunakan data statistik dan indikator gender yang memadai dan dikumpulkan dengan seksama secara terus menerus.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA SAMBUTAN	i
KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
ISTILAH TEKNIS	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	3
BAB 2. DEMOGRAFI	13
BAB 3. PENDIDIKAN	21
BAB 4. KESEHATAN	29
BAB 5. FORMASI RUMAH TANGGA	39
BAB 6. KEGIATAN EKONOMI	49
BAB 7. SEKTOR PUBLIK	61
BAB 8. MANAJEMEN LINGKUNGAN	69
BAB 9. LAIN-LAIN	75

DAFTAR TABEL

	Halaman	
Tabel 1.1	Pertumbuhan dan Kontribusi Sektoral PDRB Kabupaten Kendari Tahun 1997-2001	7
Tabel 2.1	Rasio Jenis Kelamin menurut Kelompok Umur Tahun 1990-2000	14
Tabel 2.2	Komposisi Penduduk menurut Tingkat Usia dan Jenis Kelamin Tahun 1990 dan 2000	16
Tabel 3.1	Persentase Penduduk Berumur 10-44 Tahun yang Buta Huruf Tahun 1999-2002	22
Tabel 3.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 1999-2002	23
Tabel 3.3	Banyaknya Tenaga Pengajar Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2002	25
Tabel 4.1	Persentase Penduduk Yang Berobat Jalan menurut Tempat Pelayanan dan Jenis Kelamin Tahun 2002	30
Tabel 4.2	Banyaknya Tenaga Kesehatan di Kabupaten Kendari menurut Jenis Kelamin Tahun 2002	31
Tabel 4.3	Persentase Penduduk yang Mengalami Gangguan Kesehatan Tahun 2000-2002	32
Tabel 4.4	Persentase Penduduk Laki-laki dan Perempuan menurut Keluhan Gangguan Kesehatan Tahun 2002	33
Tabel 4.5	Persentase Balita yang Pernah Diimunisasi menurut Jenis Vaksin dan Jenis Kelamin Tahun 1999	34
Tabel 4.6	Persentase Balita menurut Status Gizi dan Jenis Kelamin Tahun 2002	35
Tabel 4.7	Persentase Penduduk Usia 0-59 Bulan menurut Lamanya Pemberian ASI dan Jenis Kelamin Tahun 2002	36
Tabel 5.1	Persentase Kepala Rumah Tangga menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan Tahun 2002	40
Tabel 5.2	Persentase Anak yang Masih Sekolah menurut Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga Tahun 2002	41

Tabel 5.3	Persentase Penduduk menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin Tahun 2000-2002	43
Tabel 5.4	Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 10 Tahun Keatas menurut Umur Perkawinan Pertama Tahun 2000-2002	44
Tabel 5.5	Perkembangan Penduduk Perempuan Usia 15-49 Tahun Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan Alat KB menurut Umur (Tahun) Tahun 2000-2002	45
Tabel 5.6	Perkembangan Penduduk Perempuan Berstatus Kawin Usia 15-49 Tahun menurut Kontrasepsi KB yang Sedang Digunakan Tahun 2000-2002	46
Tabel 6.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Wilayah dan Jenis Kelamin Tahun 2000	50
Tabel 6.2	Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Wilayah dan Jenis Kelamin Tahun 2000	51
Tabel 6.3	Penduduk Yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Tahun 2000	53
Tabel 6.4	Persentase Penduduk Sebagai Tenaga Tidak Dibayar menurut Wilayah dan Jenis Kelamin Tahun 2000	55
Tabel 6.5	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas menurut Status Pekerjaan, Daerah, dan Jenis Kelamin	56
Tabel 6.6	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Rata-rata Jam Kerja dan Upah Tahun 2002	58
Tabel 7.1	Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Kendari Tahun 2001	61
Tabel 7.2	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Kendari Tahun 2002	62
Tabel 7.3	Persebaran Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Struktural Tahun 1997-1999	63
Tabel 7.4	Komposisi Jabatan Eksekutif menurut Jenis Kelamin Tahun 2002	64
Tabel 7.5	Komposisi Jabatan di Bidang Hukum menurut Jenis Kelamin Tahun 2002	65
Tabel 9.1	Banyaknya Kekerasan Terhadap Perempuan menurut Jenis Kekerasan dan Jenis Kelamin Tahun 2002	76

DAFTAR GAMBAR

	Halaman	
Gambar 1.1	Persentase Penduduk Kabupaten Kendari menurut Suku Bangsa, 2000	8
Gambar 1.2	Persentase Penduduk Kabupaten Kendari menurut Agama, 2000	9
Gambar 2.1	Piramida Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 1990 (000 Jiwa)	16
Gambar 2.2	Piramida Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 1990 (000 Jiwa)	16
Gambar 3.1	Persentase Penduduk Umur 7 Tahun ke Atas menurut Pendidikan yang Ditamatkan, 2000	24
Gambar 6.1	TPAK menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin dan Daerah Tahun 2000	50
Gambar 6.2	Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin dan Daerah Tahun 2000	52

ISTILAH TEKNIS

1. Singkatan/Akronim

AKB/IMR	= Angka Kematian Bayi/ <i>Infant Mortality Rate</i>
AKDR/IUD	= Alat KB Dalam Rahim/ <i>Internal Uterus Devices</i>
AKT/TFR	= Angka Kelahiran Total/ <i>Total Fertility Rate</i>
ALH	= Anak Lahir Hidup
APS	= Angka Partisipasi Sekolah
ART	= Anggota Rumahtangga
Balita	= Bawah Lima Tahun
DPRD	= Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Inpres	= Instruksi Presiden
KB	= Keluarga Berencana
KRT	= Kepala Rumahtangga
KTP	= Kekerasan Terhadap Perempuan
L/Lk	= Laki-laki
LSM	= Lembaga Swadaya Masyarakat
MOP	= Medis Operasi Pria/ <i>Vasektomi</i>
MOW	= Medis Operasi Wanita/ <i>Tubektomi</i>
No.	= Nomor
P/Pr	= Perempuan
PNS	= Pegawai Negeri Sipil
RI	= Republik Indonesia
Sakernas	= Survei Angkatan Kerja Nasional
SD	= Sekolah Dasar
SDKI	= Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia
SLTA/SMA	= Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sekolah Menengah Atas
SLTP/SMP	= Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Sekolah Menengah Pertama
SMK	= Sekolah Menengah Kejuruan
SMAM	= Singulate Mean Age at Marriage
SMU	= Sekolah Menengah Umum
Supas	= Survei Penduduk Antar Sensus
Susenas	= Survei Sosial Ekonomi Nasional
TK	= Tenaga Kerja
TPAK	= Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	= Tingkat Pengangguran Terbuka
UU	= Undang-Undang
WCC	= Women Crisis Centre

2. Ukuran yang Digunakan

Data yang disajikan dalam penulisan ini bukan hanya merupakan angka absolut, tetapi juga berupa angka rasio, atau proporsi/persentase dan indikator. Adapun ukuran-ukuran yang dipergunakan antara lain:

- a. **Rasio Jenis Kelamin (RJK)**, merupakan jumlah penduduk laki-laki dibagi dengan penduduk perempuan dikali dengan seratus. Hasilnya secara umum berkisar angka seratus. Misalnya, RJK sebesar 94 berarti ada 94 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan.
- b. **Angka Buta Huruf (ABH)**, adalah perbandingan jumlah penduduk usia 10-44 tahun yang tidak dapat membaca dan menulis huruf latin maupun huruf lainnya terhadap seluruh penduduk usia 10-44 tahun dikali dengan seratus. Hasilnya jika semakin kecil akan semakin baik atau menggambarkan kondisi/tingkat kesejahteraan yang lebih baik.
- c. **Angka Partisipasi Sekolah (APS)** untuk kelompok usia sekolah tertentu, adalah perbandingan antara penduduk usia tersebut yang bersekolah terhadap seluruh penduduk usia kelompok tersebut dikali seratus. Kelompok usia tersebut adalah usia 7-12 tahun untuk SD, 13-15 tahun untuk SLTP, 16-18 tahun untuk SLTA, dan 19-24 tahun untuk akademi/ perguruan tinggi. Ukuran ini akan semakin baik jika besarnya semakin mendekati angka 100.
- d. **Angka Kematian Bayi (AKB)** secara sederhana diformulasikan sebagai perbandingan antara jumlah kematian bayi (usia di bawah 1 tahun) terhadap seluruh kelahiran hidup dalam suatu periode tertentu. Besaran ini akan semakin baik jika angkanya semakin kecil.
- e. **Umur Perkawinan Pertama** biasanya hanya ditanyakan kepada perempuan, yang merupakan umur pertama kali perempuan tersebut melangsungkan perkawinan. Dalam menganalisis ukuran ini

biasanya digunakan ukuran normatif 16 tahun sebagai batas usia minimal, yang ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan, untuk melangsungkan perkawinan.

- f. **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**, adalah perbandingan antara penduduk usia 15 tahun ke atas yang tergolong sebagai angkatan kerja (AK) terhadap seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas dikali 100. Adapun AK adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dan yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan. Periode penentuan seseorang itu termasuk dalam AK ataupun bukan AK (BAK) adalah selama seminggu sebelum masa pendataan. Dalam penyajiannya ukuran ini tidak ada satuannya, tetapi dalam pengertiannya menggambarkan proporsi atau persentase. Misalnya TPAK sebesar 78 berarti dari 100 orang penduduk usia 15 tahun ke atas, 78 orang diantaranya tergolong sebagai mereka yang sedang bekerja atau tidak sedang bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan.
- g. **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**, adalah perbandingan antara pencari kerja (tidak bekerja) usia 15-tahun ke atas terhadap angkatan kerja (AK) dikali 100. Penyajian ukuran ini juga tanpa satuan, misalnya TPT sebesar 3,5 artinya adalah ada 3,5 persen AK yang sedang mencari kerja atau menganggur.

3. Konsep Operasional.

- a. **Analisis Gender**: suatu penelaahan terhadap relasi laki-laki perempuan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat untuk menuju terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender dalam masyarakat.
- b. **Bias Gender**: kesenjangan peran, fungsi, tanggung jawab, dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat sehingga menimbulkan diskriminasi perlakuan.

- c. **Gender** adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat sebagai hasil konstruksi sosial yang dapat berubah dan diubah sesuai dengan perubahan/tuntutan jaman.
- d. **Indikator Gender**: suatu konsep yang menggambarkan ukuran keberhasilan/kecenderungan perubahan dari angka terpilan setelah jangka waktu tertentu
- e. **Gender Mainstreaming/Pengarusutamaan Gender (PUJ)**, adalah strategi pengintegrasian kesetaraan dan keadilan gender ke dalam berbagai kegiatan pembangunan mulai dari tahap perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, sampai pada evaluasi dan monitoring.
- f. **Statistik Gender**: angka terpilah antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan yang menggambarkan kesenjangan kedudukan, peran, tanggung jawab, dan peluang.
- g. **Kesetaraan Gender** adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
- h. **Keadilan Gender** adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.

BAB 1.
PENDAHULUAN

<https://sulfurtrioxide.com>

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia telah menempatkan manusia dan nilai-nilai kemanusiaan sebagai pusat seluruh kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya, secara adil dan merata dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan dan pedoman pembangunan nasional. Namun demikian, pada hakekatnya pembangunan yang telah dimulai sejak kemerdekaan Indonesia, lebih separuh abad lamanya, nampaknya perlu koreksi agar sesuai dengan yang diamanatkan dalam UUD 1945 dan GBHN sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil agar ketidakserasian dan ketidakadilan gender yang selama ini berlaku di dalam masyarakat dapat diatasi.

Pada dasarnya, kebijakan, program maupun kegiatan pembangunan tidak pernah bermaksud membedakan antara laki-laki dan perempuan, tetapi hasilnya ternyata memperlihatkan kesenjangan gender yang terjadi hampir di semua bidang pembangunan. Kesenjangan gender ditandai oleh masih rendahnya peluang yang dimiliki perempuan untuk bekerja dan berusaha, serta rendahnya akses mereka terhadap sumber daya ekonomi, seperti teknologi, informasi, pasar, kredit dan modal kerja. Semua ini berdampak pada masih rendahnya partisipasi, akses dan kontrol yang dimiliki serta manfaat yang dinikmati perempuan dalam pembangunan.

Bentuk-bentuk ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dikenal dengan kesenjangan gender yang pada gilirannya menimbulkan permasalahan gender. Dalam hal pendidikan, kesempatan berusaha, dan keterlibatan sebagai politisi misalnya, keterlibatan kaum laki-laki lebih menonjol dibanding perempuan. Demikian juga di banyak bidang kehidupan lainnya. Meskipun kesenjangan tersebut semakin lama semakin menyempit, akan tetapi di bidang-bidang tertentu kemajuannya berjalan lambat. Oleh

karena itu diperlukan berbagai upaya yang sungguh-sungguh dari berbagai pihak untuk mempercepat tercapainya derajat kesetaraan gender yang diharapkan.

Salah satu upaya yang dilakukan sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam menanggulangi kesenjangan gender tersebut ialah dibentuknya Kantor Menteri Muda Urusan Peranan wanita pada tahun 1978, yang kemudian ditingkatkan statusnya menjadi Menteri Negara Urusan Peranan Wanita pada tahun 1983, dan pada tahun 1999 diubah menjadi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Jika sebelum tahun 1999 upaya pemerintah diarahkan pada bagaimana meningkatkan peranan wanita dalam pembangunan, maka sejak GBHN 1999, kebijakan pembangunan diarahkan untuk memberdayakan perempuan dan meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan di semua sektor pembangunan.

Strategi pengarusutamaan gender menjadi semakin penting di era otonomi ini untuk mengarahkan pembangunan daerah agar tidak terlalu timpang pada orientasi pembangunan fisik semata, melainkan juga mempertimbangkan berbagai keseimbangan gender yang terjadi dalam berbagai aktivitas pembangunan. Berbagai bentuk kesenjangan peran dan kedudukan perempuan dan laki-laki (kesenjangan gender) dapat dilihat dengan menggunakan data statistik maupun indikator gender. Oleh karena itu ketersediaan data statistik yang memadai akan dapat membantu mengarahkan pembangunan agar mampu menyelesaikan permasalahan gender.

Upaya untuk menyusun statistik dan indikator yang berkaitan dengan gender telah banyak dilakukan dalam rangka mengidentifikasi adanya kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan. Namun demikian, ketersediaan data statistik dan indikator yang terkait dengan gender, tidak serta merta menghasilkan kebijakan program pembangunan

yang responsif gender, tanpa kepedulian para pembuat kebijakan terhadap kesetaraan dan keadilan gender.

Data dan statistik gender Kabupaten Kendari yang disusun ini merupakan salah satu upaya untuk membantu pemerintah daerah dalam rangka mempertajam sasaran di atas. Profil gender yang disajikan merupakan hasil analisa statistik gender berdasarkan data kuantitatif, di bidang kependudukan, kesehatan, ekonomi dan lain-lain.

1.2 Tujuan

Penulisan ini bertujuan memberikan gambaran secara statistik mengenai kesenjangan gender di Kabupaten Kendari, dalam hal pendidikan, kesehatan, formasi rumah tangga, ketenagakerjaan dan perekonomian, kegiatan publik, lingkungan dan lain-lain. Hasil analisis kesenjangan gender di Kabupaten Kendari ini diharapkan akan menjadi bahan yang diperlukan dalam menyusun perencanaan pembangunan berwawasan kemitrasejajaran gender.

1.3 Sumber Data

Data yang digunakan dalam tulisan ini merupakan data sekunder yang dikumpulkan baik dari berbagai jenis survei dan sensus yang dilakukan BPS seperti Survei Sosisal Ekonomi Nasional (Susenas), Sensus Penduduk, Penghitungan PDRB, maupun data catatan administrasi dari instansi terkait.

1.4 Geografi

Kabupaten Kendari merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara yang terletak di bagian Selatan Khatulistiwa pada posisi $3^{\circ} 00'$ hingga $4^{\circ} 25'$ Lintang Selatan dan $121^{\circ} 73'$ hingga $123^{\circ} 15'$ Bujur Timur. Kabupaten ini di sebelah Utara berbatasan dengan Propinsi Sulawesi Selatan dan Propinsi Sulawesi Tengah, di sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda dan Laut Maluku, di sebelah Selatan berbatasan dengan Selat

Tiworo serta di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara.

Luas wilayah daratan Kabupaten Kendari, 16.480 Km² atau 43,21 persen dari luas wilayah daratan Sulawesi Tenggara. Sedangkan luas wilayah perairan (laut) + 11.960 Km² atau 10,89 persen dari luas perairan Sulawesi Tenggara. Selain jazirah Tenggara Pulau Sulawesi setidaknya terdapat pula 9 pulau kecil yang sangat cocok untuk wisata bahari.

1.5 Ekonomi

Kegiatan ekonomi di Kabupaten Kendari mengalami kemajuan pesat hingga paruh pertama dasawarsa sembilan puluhan. Kemajuan ini tercapai berkat partisipasi semua pihak termasuk partisipasi aktif kaum perempuan di beberapa sektor ekonomi. Sampai dengan tahun 1996 pertumbuhan ekonomi tetap tinggi yaitu sebesar 6,1 persen. Namun krisis ekonomi yang berkepanjangan sejak awal paruh kedua tahun 1997 telah menimbulkan kemunduran ekonomi yang ditandai dengan melemahnya tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 1997 yang hanya mencapai 3,0 persen dan bahkan pada tahun 1998, dampak krisis ekonomi telah menimbulkan kontraksi pertumbuhan yang belum pernah dialami sebelumnya. Hal ini tercermin dari angka pertumbuhan tahun 1998 sebesar minus 3,7 persen. Pada tahun 1999 keadaan ekonomi sudah sedikit membaik, ini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,7 persen.

Kontribusi perekonomian di Kabupaten Kendari banyak disumbang oleh sektor pertanian yang ternyata lebih dapat bertahan menghadapi krisis ekonomi. Pada awal krisis tahun 1997 sektor ini menyumbang sebesar 37,8 persen, meningkat menjadi 42,1 persen pada tahun 1998 dan terus meningkat menjadi 42,9 persen tahun 1999. Tanda-tanda kepulihan ekonomi sudah mulai tampak pada tahun 2000, dimana sektor-sektor nonagrikultur telah berkembang dan menggeser posisi sektor pertanian yang turun menjadi 41,4 persen tahun 2000 dan 40,3 persen tahun 2001. Penyumbang perekonomian terbesar kedua adalah sektor jasa-jasa yaitu 20,5 persen tahun 1997 dan

relatif stabil pada tahun-tahun berikutnya. Penyumbang terbesar berikutnya berasal dari sektor konstruksi, sebesar 18,5 persen pada tahun 1997 yang mengalami penurunan pada tahun 1998.

Berdasarkan data Sensus Penduduk tahun 2000, yang bekerja pada sektor perdagangan pada umumnya perempuan dan kontribusi sektor ini terhadap PDRB cukup besar dan selalu meningkat selama tahun 1997-2001 (Tabel 1.1). Sementara itu sektor angkutan yang kurang diminati perempuan, sejak krisis hingga tahun 1999 terus menurun meskipun kemudian meningkat secara signifikan pada tahun 2000 dan 2001. Hal ini memberikan indikasi bahwa peran perempuan dalam sector formal cukup nyata. Bila upaya pemberdayaan perempuan terus dilakukan, maka perkembangan pembangunan daerah dapat lebih dipercepat lagi.

Tabel 1.1 Pertumbuhan dan Kontribusi Sektoral PDRB Kabupaten Kendari Tahun 1997-2001

Indikator	1997	1998	1999	2000	2001*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertumbuhan	3,0	-3,7	3,	2,9	4,8
2. Kontribusi sektoral dalam PDB (%)	100,0	100,0	100,	100,0	100,0
- Pertanian	37,8	42,2	42,	41,4	40,3
- Pertambangan	3,4	3,4	3,	3,3	3,4
- Industri	2,9	3,1	2,	2,7	2,8
- Listrik, gas dan air bersih	0,8	0,9	0,	1,0	1,1
- Konstruksi	18,5	12,4	12,	12,9	13,5
- Perdagangan	7,3	8,6	8,	9,1	9,5
- Pengangkutan	4,2	4,0	3,	4,6	4,9
- Keuangan	4,7	4,8	4,	4,7	4,6
- Jasa-jasa	20,5	20,7	20,	20,3	20,0
3. Inflasi (%)	8,4	71,1	1,	10,9	11,9
4. Pengangguran terbuka	--	1,7	--	2,9	3,3

Catatan: *) Angka sementara

Sumber: BPS Kabupaten Kendari

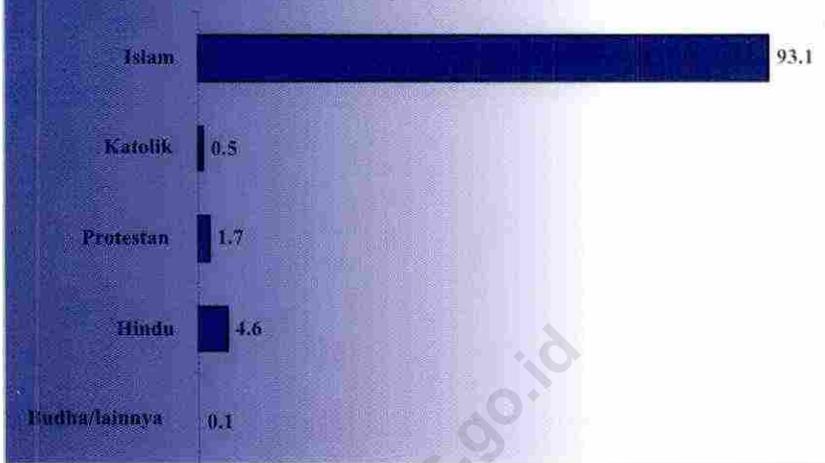
1.6 Suku dan Agama

Pengaruh suku dan agama dalam kesenjangan gender dianggap sangat besar. Suku dan agama mempengaruhi sikap dan tingkah laku masyarakat dalam menilai keberadaan perempuan baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Di Kabupaten Kendari terdapat 8 suku besar, namun lebih dari 50 persen penduduk adalah Suku Tolaki, yang merupakan suku asli. Suku terbesar di Kabupaten Kendari ini terdiri atas beberapa sub-suku, yaitu Wiwirano, Labean, Aserawanua, Mowewe, Mekongga, dan Tamboki. Suku lain yang cukup besar persentasenya selain Tolaki adalah Jawa (16,1%) dan Bugis (13,2%).



Agama yang dianut penduduk pada umumnya adalah Islam (93,13 %), sementara penganut agama lainnya proporsinya di bawah 5 persen.

Gambar 1.2 Persentase Penduduk Kabupaten Kendari menurut Agama, 2000



BAB 2.
DEMOGRAFI

<https://sulfid.com.sg>

BAB 2. DEMOGRAFI

Dalam Indonesia Human Development Report 2001¹, pada tahun 1999 angka harapan hidup bagi penduduk laki-laki di Kabupaten Kendari sekitar 63 tahun, sedangkan perempuan sekitar 67 tahun. Artinya secara rata-rata bayi laki-laki yang baru lahir akan hidup selama 63 tahun, sementara perempuan lebih lama lagi, sekitar 67 tahun. Perubahan/perbaikan terhadap angka harapan hidup dapat mendorong perubahan pada struktur demografi.

Dalam bab ini akan dibahas masalah demografi dalam hubungannya dengan kesetaraan gender berupa: rasio jenis kelamin, struktur umur dan komposisi penduduk.

2.1 Rasio Jenis Kelamin

Bias jenis kelamin yang menunjuk pada preferensi jenis kelamin tertentu, biasanya berkaitan dengan budaya di suatu daerah. Di Kabupaten Kendari tidak ada budaya khusus yang menyebutkan mengenai preferensi terhadap satu jenis kelamin tertentu. Namun demikian pada umumnya seorang bapak lebih menyukai anak laki-laki dan seorang ibu lebih menyukai anak perempuan, karena mereka masing-masing beranggapan anaknya dapat membantu mereka bekerja.

Indikator bias jenis kelamin yang umumnya digunakan adalah rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin merupakan perbandingan antara banyaknya laki-laki terhadap 100 perempuan. Hasil sensus penduduk tahun 2000 menunjukkan bahwa rasio jenis kelamin di Kabupaten Kendari sebesar 105,2 yang berarti pada setiap 205 penduduk 100 diantaranya adalah perempuan dan sisanya laki-laki. Kondisi ini sesungguhnya lebih timpang dari hasil Sensus Penduduk tahun 1990 yang mencapai 104,2. Peningkatan

¹ Indonesia Human Development Report 2001, Towards a New Consensus: Democracy and Human Development in Indonesia, BPS-Statistics Indonesia, Bappenas, and UNDP Indonesia

rasio jenis kelamin secara matematis akan mendorong dominasi peran laki-laki secara kuantitatif dari perempuan dalam pembangunan.

Tabel 2.1 Rasio Jenis Kelamin menurut Kelompok Umur Tahun 1990-2000

Kelompok Umur	1990	2000
(1)	(2)	(3)
0 - 4	106,9	104,2
5 - 9	106,7	107,1
10 - 14	104,1	108,3
15 - 19	104,6	106,2
20 - 24	92,6	94,6
25 - 29	91,7	95,5
30 - 34	97,6	106,7
35 - 39	106,8	103,2
40 - 44	108,1	105,1
45 - 49	108,2	114,2
50 - 54	118,3	107,8
55 - 59	122,6	115,3
60 - 64	127,7	120,6
65 - 69	128,3	127,3
70 +	129,9	129,6
Jumlah	104,2	105,2

Sumber: BPS, Sensus Penduduk 1990, 2000

Dilihat menurut kelompok umur (Tabel 2.1), rasio jenis kelamin menunjukkan suatu pola tertentu. Pada tahun 2000, kelompok umur 0-4 tahun hingga 15-19 tahun penduduk laki-laki lebih banyak dari perempuan. Namun pada kelompok umur 20-24 tahun hingga 25-29 tahun, justru penduduk perempuan lebih banyak dari pada penduduk laki-laki. Ada beberapa kemungkinan sebab terjadinya hal tersebut misalnya banyak laki-laki pada usia tersebut yang ke luar kabupaten untuk tujuan bekerja atau

sekolah, yang berarti mobilitas penduduk laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Selanjutnya pada kelompok umur 30-34 hingga 65 tahun ke atas penduduk laki-laki lebih banyak dari perempuan. Pola ini sama dengan tahun 1990, terkecuali kelompok umur 30-34 tahun. Pada tahapan usia ini, kaum lelaki yang pergi merantau tadi telah kembali pulang, dan mungkin telah berumah tangga dan menetap, seperti yang biasa dilakukan oleh suku yang menjadi penghuni terbesar kabupaten ini.

2.2 Struktur Umur

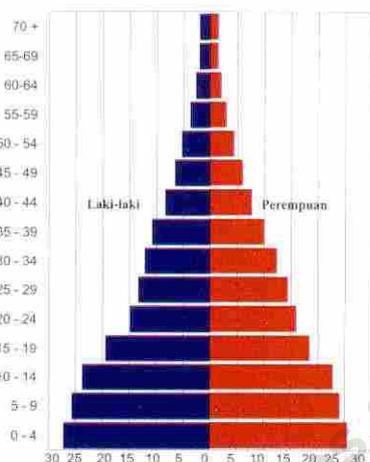
Salah satu ciri penduduk dengan angka kelahiran tinggi adalah besarnya proporsi penduduk berumur muda (0 – 14 tahun). Keadaan seperti ini masih ditemukan di Kabupaten Kendari. Hasil Sensus Penduduk tahun 1990 menunjukkan seorang ibu rata-rata melahirkan sekitar 2-3 orang anak, sepuluh tahun kemudian (SP2000), sebagai akibat dari suksesnya program keluarga sejahtera dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di masa lalu, rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu menurun menjadi sekitar 1-2 anak. Meski demikian, kesibukan kaum ibu di dalam rumah tangga masih cukup besar. Menurunnya tingkat fertilitas mendorong struktur umur penduduk bergeser ke arah penduduk tua. Gambaran tentang pergeseran struktur umur penduduk tersebut secara visual dapat dilihat dari bentuk piramidanya.

Berdasarkan struktur umur penduduk dapat dibagi atas penduduk muda/anak-anak (0 - 14 tahun) dan orang dewasa (15 – 64 tahun) serta lanjut usia (65 tahun keatas). Anak-anak dan lanjut usia disebut kelompok usia tidak produktif, sedangkan orang dewasa disebut kelompok usia produktif. Perbandingan penduduk tidak produktif dan penduduk produktif merupakan rasio ketergantungan (*dependency ratio*).

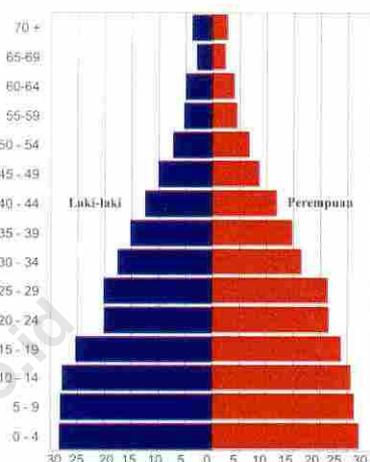
Rasio ketergantungan turun dari sekitar 82 persen tahun 1990 menjadi 64 persen tahun 2000. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 1990 setiap 11 penduduk produktif terbebani oleh 9 penduduk tidak produktif. Pada

tahun 2000 beban penduduk produktif berkurang, tanggungannya menjadi 6 penduduk tidak produktif.

Gambar 2.1. Piramida Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 1990 (000 Jiwa)



Gambar 2.2. Piramida Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2000 (000 Jiwa)



Tabel 2.2 Komposisi Penduduk menurut Tingkat Usia dan Jenis Kelamin Tahun 1990, 2000

Tingkat Usia	1990			2000		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Anak-anak	43,4	42,7	43,1	36,8	36,4	36,6
Lanjut Usia	2,1	1,7	1,9	2,8	2,3	2,6
Anak-anak + Lanjut Usia	45,5	44,4	45,0	39,7	38,6	39,2
Dewasa	54,5	55,6	55,0	60,3	61,4	60,8
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber: BPS Sensus Penduduk 1990 dan 2000

Pada tahun 2000, lebih sepertiga dari jumlah penduduk yang menjadi tanggungan adalah anak-anak (0-14 tahun). Persentase anak yang menjadi tanggungan tersebut seimbang antara laki-laki dan perempuan, begitu pula dengan persentase penduduk lanjut usia yang menjadi tanggungan (Tabel 2.2). Sementara itu persentase perempuan dan laki-laki yang termasuk dalam kategori sebagai penanggung beban relatif sama.

Secara khusus dengan menggunakan rasio anak balita (0-4 tahun) terhadap wanita usia subur (15-49 tahun) dapat dilihat rata-rata anak yang menjadi beban setiap wanita. Pada tahun 2000 rata-rata jumlah anak yang menjadi beban dari setiap wanita sebanyak 0,5 anak atau setiap anak menjadi beban 2 orang wanita.

<https://sultra.bps.go.id>

BAB 3.
PENDIDIKAN

<https://sulfid.com/sulfid.com-go.id>

BAB 3. PENDIDIKAN

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia bertitik tolak pada upaya pembangunan di bidang pendidikan. Berdasarkan amanat UUD 1945 dan GBHN, pemerintah berkewajiban menyelenggarakan program pendidikan nasional yang berkualitas meliputi seluruh lapisan masyarakat, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Bahkan sejak tahun 1989, dengan UU No.2/1989, telah dicanangkan bahwa mulai tahun 1994 akan diberlakukan wajib belajar 9 tahun. Namun setelah penancangan tersebut berjalan selama 10 tahun, hasilnya ternyata belum begitu menggembirakan. Ini ditunjukkan oleh masih banyak penduduk yang berpendidikan hanya sebatas sekolah dasar, bahkan sebagian diantaranya masih buta huruf dan kebanyakan diantara mereka justru perempuan. Sedikit sekali kaum perempuan yang dapat menyelesaikan pendidikan hingga jenjang yang tinggi.

3.1 Buta Huruf dan Partisipasi Sekolah

Tingginya pendidikan diharapkan dapat membuka cakrawala pandang anak bangsa, sehingga terbuka wawasannya dalam menyikapi adanya kesenjangan di dalam kelompoknya, termasuk kesenjangan peran antara perempuan dan laki-laki. Namun faktanya, hingga tahun 1999 di Kabupaten Kendari, masih cukup besar proporsi perempuan yang buta huruf dibanding laki-laki. Pada akhir dasawarsa 90-an itu, persentase buta huruf umur 10-44 tahun untuk perempuan mencapai 10,1 persen, sedangkan laki-laki sebesar 6,5 persen. Perbedaan ini kemungkinan disebabkan oleh tingginya angka putus sekolah pada tingkat SD.

Keberhasilan pemerintah dan masyarakat dalam pemberantasan buta huruf di Kabupaten Kendari (lihat Kabupaten Kendari Dalam Angka tahun 2000) baru mampu menurunkan proporsi penduduk yang buta huruf tetapi belum mampu menekan kesenjangan gender. Meski masih terlihat perbedaan yang cukup berarti dalam proporsi penduduk yang buta huruf, namun kondisi umum menunjukkan arah yang membaik. Ini terlihat dari semakin kecilnya proporsi penduduk yang buta huruf.

Tabel 3.1 Persentase Penduduk Berumur 10-44 Tahun yang Buta Huruf Tahun 1999-2002

Tahun	Perempuan	Laki-laki	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1999	10,1	6,5	6,6
2002	4,0	2,1	3,1

Sumber: BPS, Data Kor Susenas 1999-2002

3.2 Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) dapat dikelompokkan menurut usia 7-12 tahun, 13-15 tahun, 16-18 tahun, dan 19-24 tahun. APS penduduk usia 7-12 tahun adalah setara dengan jenjang pendidikan SD, sehingga angkanya memberikan gambaran tentang proporsi penduduk usia 7-12 tahun yang duduk di bangku SD, demikian pula untuk usia 13-15 tahun (jenjang pendidikan SLTP) dan seterusnya.

Adanya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anak mereka setidaknya pada jenjang pendidikan terendah kemungkinan menjadi faktor yang turut menekan ketimpangan. Hal ini dapat dilihat dari perubahan kesetaraan angka partisipasi sekolah (APS) pada tingkat SD dari tahun 1999 sampai tahun 2002 (Tabel 3.2).

Kesempatan bersekolah antara laki-laki dan perempuan mulai menunjukkan perbedaan yang berarti pada penduduk usia 13-15 tahun, yaitu pada jenjang pendidikan SLTP. Pada tahun 2002, APS perempuan adalah sekitar 76 persen, sedangkan untuk laki-laki sekitar 80 persen. Perbedaan kesempatan untuk bersekolah itu semakin besar pada usia 16 - 18 tahun atau pada jenjang pendidikan SLTA dimana APS untuk laki-laki lebih tinggi sekitar 10 persen dari pada APS perempuan. Pada jenjang pendidikan tinggi yaitu pada usia 19-24 tahun, perbedaan APS laki-laki dan perempuan tampak turun menjadi sekitar 2,6 persen dari 3,6 persen tahun 1999.

Tabel 3.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 1999-2002

Kelompok Umur/ Jenis Kelamin		1999	2002
(1)		(4)	(5)
7-12 Tahun	Perempuan	96,4	96,1
	Laki-laki	94,5	96,4
	Total	95,4	96,3
13-15 Tahun	Perempuan	76,2	76,2
	Laki-laki	69,9	80,2
	Total	72,6	78,3
16-18 Tahun	Perempuan	41,9	36,5
	Laki-laki	42,8	46,2
	Total	42,4	41,1
19-24 Tahun	Perempuan	5,5	6,8
	Laki-laki	9,1	9,4
	Total	7,3	8,2

Sumber: BPS, Data Kor Susenas 1999-2002

Ada beberapa alasan yang mungkin menyebabkan rendahnya APS perempuan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi di Kabupaten Kendari. Salah satunya adalah faktor perkawinan, karena ada sekitar 21 persen perempuan menikah pada usia 16 tahun ke bawah, 12 persen pada usia 17 tahun dan 15 persen usia 18 tahun (Susenas 2002). Perempuan yang telah menikah pada usia dini tersebut umumnya memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan.

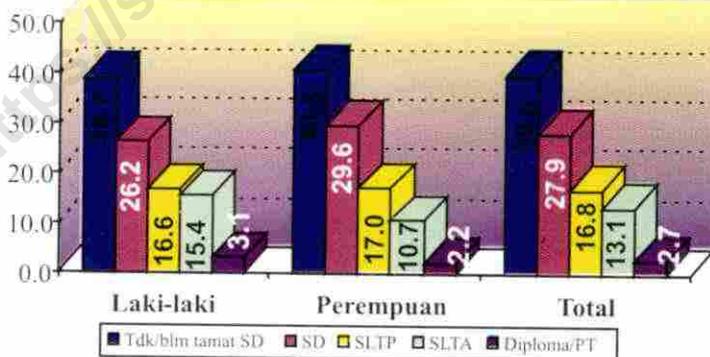
3.3 Pendidikan Yang Ditamatkan

Secara umum, tingkat pendidikan penduduk perempuan di Kabupaten Kendari relatif rendah, sebagaimana terlihat pada Gambar 3.1. Pada tahun 2002 proporsi perempuan pada tingkat pendidikan SD dan SLTP telah menunjukkan angka yang seimbang dengan laki-laki. Kemungkinan besar hal ini karena adanya program wajib belajar 9 tahun.

Ketimpangan antara laki-laki dan perempuan mulai terlihat pada tingkat pendidikan SLTA. Beda persentase antara laki-laki dan perempuan yang berpendidikan SLTA baik pada tahun 1999 maupun pada tahun 2002 relatif kecil, yaitu sekitar 7 persen. Namun dengan kenaikan persentase masing-masing yang relatif sama, baik laki-laki maupun perempuan selama 1999-2002 hanya sekitar 3 persen, maka proporsi perempuan pada tingkat pendidikan ini akan selalu lebih kecil. Untuk memperkecil beda proporsi tersebut perlu perlakuan khusus untuk perempuan. Misalnya dengan memperkecil jumlah perempuan yang kawin muda (< 16 tahun).

Pada tingkat pendidikan tinggi, baik laki-laki maupun perempuan persentasenya sangat kecil (kurang dari 5 persen pada tahun 2002). Hal ini berkaitan dengan kondisi ketenagakerjaan dan migrasi. Untuk mendapatkan upah yang lebih besar penduduk yang mempunyai ijazah perguruan tinggi biasanya lebih suka bekerja di daerah perkotaan, di kota lain bahkan di luar pulau. Namun demikian ketimpangan gender masih tetap ada.

Gambar 3.1 Persentase Penduduk Umur 7 Tahun ke Atas menurut Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2000



Sumber: BPS, Kor Susenas 2002

3.4 Tenaga Pengajar

Keberadaan tenaga pengajar dianggap mutlak diperlukan dalam kegiatan pendidikan. Kegiatan belajar mengajar pada sebuah pendidikan dipastikan tidak dapat berjalan tanpa tenaga pengajar. Salah satu peran serta perempuan dalam menciptakan tunas bangsa yang bermutu guna meneruskan dan memelihara pembangunan dapat dilakukan dalam sektor ini. Pendidikan formal di Kabupaten Kendari pada tahun 2002, ditangani oleh tenaga pengajar berjumlah 5.735 orang, yang terdiri atas 3.793 pengajar laki-laki dan 1.942 pengajar perempuan. Berarti "rasio pengajar", perempuan persatu laki-laki sekitar 0,5 atau setiap 1 pengajar perempuan terdapat 2 pengajar laki-laki.

Rasio pengajar (Tabel 3.3), berbanding terbalik dengan tingkat/jenjang pendidikan. Semakin tinggi tingkat/jenjang pendidikan semakin rendah rasionya. Gejala ini menunjukkan adanya ketimpangan gender yang semakin tinggi dengan semakin tingginya tingkat/jenjang pendidikan.

Tabel 3.3 Banyaknya Tenaga Pengajar Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2002

Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	2.547	1.426	0,6
SLTP	864	397	0,5
SLTA	340	112	0,3
PT/Akademi	44	10	0,2
Jumlah	3.793	1.942	0,5

Sumber: Dinas P&K Kabupaten Kendari

Pada jenjang pendidikan SD rasio pengajar sekitar 0,6 sedangkan pada jenjang pendidikan tinggi (PT/akademi) hanya 0,2. Artinya jumlah pengajar perempuan banding pengajar laki-laki pada tingkat SD adalah 3 berbanding 5, sedangkan pada PT/akademi sekitar 1 berbanding 5.

Ketimpangan gender tersebut menunjukkan tenaga pengajar perempuan $\frac{1}{2}$ kali lebih sedikit dibandingkan dengan tenaga pengajar laki-laki. Ketimpangan gender ini kemungkinan besar diawali sejak pendidikan dini anak. Misalnya anak yang mengikuti pendidikan pra sekolah/TK. Data Susenas 2002 menunjukkan ada 17 persen anak laki-laki (3-6 tahun) yang mengikuti pendidikan tersebut, sedangkan anak perempuan hanya sebanyak 15 persen.

<https://sultra.bps.go.id>

BAB 4.
KESEHATAN

<https://sulfurbooks.go.id>

BAB 4. KESEHATAN

Derajat atau tingkat kesehatan masyarakat menurut Bloem (1974) dipengaruhi oleh faktor perilaku individu, keturunan, pelayanan kesehatan dan lingkungan. Kecuali faktor keturunan, faktor yang lain semuanya berkaitan dengan jender. Bab ini mencoba mengungkapkan gambaran tentang pelayanan kesehatan, pola morbiditas, imunisasi, dan status gizi balita.

4.1 Pelayanan Fasilitas Kesehatan

Penyediaan tempat pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi kebutuhan kesehatan seluruh masyarakat. Tabel 4.1 memperlihatkan bahwa persentase penduduk baik laki-laki maupun perempuan yang berobat jalan pada tahun 2002 lebih banyak di Puskesmas (29,3 persen) dan praktik petugas kesehatan (24,1 persen). Pada kedua fasilitas ini juga persentase perempuan yang berobat jalan lebih besar dari persentase laki-laki. Sebaliknya pada tempat pelayanan yang lain seperti rumah sakit, praktik dokter dan lainnya persentase pasien laki-laki tampak lebih tinggi dari persentase pasien perempuan. Tidak jelas mengapa proporsi laki-laki yang berobat ke tempat-tempat kesehatan tersebut lebih besar dari pada perempuan, padahal tidak ada perbedaan pelayanan yang diberikan pada tempat-tempat pelayanan.

Dari tabel di bawah ini terlihat bahwa hampir di semua fasilitas kesehatan lebih banyak proporsi laki-laki daripada perempuan yang berobat, kecuali pada fasilitas puskesmas dan petugas kesehatan. Hal ini cukup mengherankan karena biasanya yang menggunakan tempat pelayanan praktek bidan, polindes/BDD dan posyandu adalah perempuan. Hal ini kemungkinan karena perempuan di Kabupaten Kendari masih cenderung melahirkan dengan bantuan dukun daripada bidan, sehingga fasilitas praktek bidan digunakan untuk melayani orang sakit baik laki-laki maupun perempuan. Di samping itu berobat ke praktek bidan, polindes ataupun ke posyandu lebih murah dibandingkan fasilitas yang lain dan tempatnya mudah dijangkau penduduk.

Tabel 4.1 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan menurut Tempat Pelayanan dan Jenis Kelamin Tahun 2002

Tempat Pelayanan	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Rumah Sakit	11,1	5,8	7,5
2. Praktek Dokter	9,3	8,6	9,9
3. Puskesmas	26,2	34,4	29,3
4. Puskesmas Pembantu	17,6	17,4	17,5
5. Poliklinik	1,5	0,0	0,9
6. Praktek Petugas Kesehatan	21,7	28,1	24,1
7. Praktek Bidan	6,1	1,7	4,4
8. Polindes/BDD	2,5	0,8	1,9
9. Posyandu	4,0	3,3	3,8
Jumlah	100,0	100,0	98,4

Sumber: Diolah dari Data Kor Susenas 2002

4.2 Jumlah Tenaga Kesehatan

Dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di samping penyediaan fasilitas kesehatan juga harus didukung oleh jumlah tenaga kesehatan yang memadai. Peran perempuan di bidang ini bisa dilakukan dengan berpartisipasi sebagai tenaga kesehatan.

Tabel 4.2 memperlihatkan bahwa pada tahun 2002 jumlah dokter di Kabupaten Kendari ada sebanyak 43 orang. Dari jumlah tersebut dokter laki-laki masih merupakan porsi yang terbesar, yaitu sebanyak 36 orang atau sekitar 84,7 persen sedangkan dokter perempuan hanya sebanyak 7 orang (16,3 %). Bila melihat jumlah tenaga medis lainnya, peran perempuan lebih besar dibanding laki-laki. Ini terlihat dari lebih separuh dari tenaga medis atau 53.3 persen dari 743 orang jumlah tenaga medis adalah perempuan.

Tingginya proporsi tenaga medis perempuan ini, diduga karena banyaknya penempatan tenaga bidan sampai ke pelosok pedesaan.

Demikian pula pada tenaga dukun bayi yang seluruhnya masih didominasi oleh perempuan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor sosial budaya masyarakat setempat, dimana perempuan di Kabupaten Kendari masih merasa risih mendapat pelayanan persalinan oleh laki-laki.

Tabel 4.2 Banyaknya Tenaga Kesehatan di Kabupaten Kendari menurut Jenis Kelamin Tahun 2002

Tenaga Kesehatan	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Dokter	36	7	43
Tenaga Medis	347	396	743
Dukun Bayi Terlatih	0	681	681

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Kendari

4.3 Pola Morbiditas

Tabel 4.3. memperlihatkan bahwa pada tahun 2002 persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan, baik laki-laki maupun perempuan di Kabupaten Kendari hampir sama, yaitu laki-laki 22,7 persen dan perempuan sekitar 22,6 persen. Angka ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, dimana persentase keluhan kesehatan perempuan hanya sekitar 19,7 persen dan laki-laki sekitar 19,9 persen. Di sini tampak bahwa angka keluhan kesehatan perempuan selalu lebih rendah dibanding laki-laki. Ini mungkin disebabkan karena laki-laki lebih rentan terhadap gangguan kesehatan sebagai akibat dari pengaruh aktivitas dan lingkungannya, dimana sebagai kepala atau calon kepala rumah tangga, laki-laki harus bertanggung jawab dan bekerja keras mencari nafkah untuk menghidupi keluarga.

Tabel 4.3 Persentase Penduduk yang Mengalami Gangguan Kesehatan Tahun 2000-2002

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
2000	14,8	16,2	15,5
2001	19,9	19,7	19,8
2002	22,7	22,6	22,6

Sumber: Diolah dari Data Kor Susenas 2000,2001,2002

Keluhan kesehatan yang paling banyak dialami oleh penduduk Kabupaten Kendari baik laki-laki maupun perempuan pada tahun 2002 (Tabel 4.4) adalah panas, batuk dan lainnya. Meskipun demikian persentase laki-laki yang mengalami gangguan kesehatan pada setiap jenis gangguan kesehatan (simpton) lebih tinggi dari perempuan, kecuali gangguan sesak napas, sakit kepala, kecelakaan dan lainnya. Hal tersebut disebabkan karena perempuan lebih banyak bekerja mengurus rumah tangga, misalnya memasak menggunakan kayu bakar yang bisa membawa konsekuensi pada timbulnya radang pada saluran pernafasan yang dapat memicu sesak napas, berbelanja, mengurus anggota rumah tangga, dan mengurus anak-anak yang mungkin menimbulkan sakit kepala.

Tabel 4.4 Persentase Penduduk Laki-laki dan Perempuan menurut Keluhan Gangguan Kesehatan Tahun 2002

Jenis Keluhan/Gangguan Kesehatan	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Panas ✓	33,6	26,1	30,0
Batuk ✓	31,4	19,3	25,5
Pilek ✓	27,1	21,3	24,3
Asma	2,5	1,7	2,1
Napas sesak ✓	1,6	2,8	2,2
Diare ✓	3,2	3,0	3,1
Campak ✓	0,2	0,2	0,2
Sakit kepala	9,0	14,6	11,7
Kejang-kejang	0,9	0,2	0,6
Lumpuh	0,9	0,9	0,9
Kecelakaan	0,2	0,5	0,4
Sakit gigi	5,2	4,7	4,9
Lainnya ✓	43,6	52,9	48,1

Sumber: Diolah dari Data Kor Susenas 2002

4.4 Imunisasi

Imunisasi bertujuan memberikan kekebalan pada anak-anak usia dibawah lima tahun (balita) dari beberapa jenis penyakit tertentu dengan cara memasukkan kuman yang telah dilemahkan ke dalam tubuh balita baik melalui suntikan maupun tetesan kemulut. Jenis imunisasi pokok yang biasa diberikan untuk meningkatkan kekebalan tubuh balita adalah BCG (pencegahan TBC), DPT (pencegahan difteri, pertusis dan tetanus), Polio (pencegahan polio), dan Campak (pencegahan campak).

Dari Tabel 4.5 terlihat bahwa cakupan pemberian imunisasi BCG terhadap balita, khususnya balita perempuan lebih rendah dibanding pada balita laki-laki, yaitu 86,2 persen berbanding 90,3 persen. Sebaliknya cakupan pemberian imunisasi DPT sampai 3 kali pada balita perempuan

meski proporsinya lebih besar namun tidak banyak berbeda dengan cakupan balita laki-laki.

Tabel 4.5 Persentase Balita yang Pernah Diimunisasi menurut Jenis Vaksin dan Jenis Kelamin Tahun 1999

Jenis vaksin/berapa kali	Jenis Kelamin			
	Laki-laki	Perempuan	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	
BCG	0	9,7	13,8	11,8
	1	90,3	86,2	88,2
DPT	0	12,1	14,7	13,5
	1	25,1	20,2	22,5
	2	16,9	15,6	16,2
	3	45,9	49,5	47,8
Polio	0	14,3	16,5	15,4
	1	22,3	22,3	22,3
	2	18,8	16,2	17,5
	3	44,6	45,0	44,8
Campak	0	26,2	25,2	25,7
	1	73,8	74,8	74,3

Sumber: Diolah dari Data Kor Susenas 1999

Pada imunisasi polio, untuk pemberian hingga 3 kali imunisasi, persentase cakupan balita perempuan dan laki-laki hampir seimbang, masing-masing 45,0 persen untuk perempuan dan 44,6 persen laki-laki. Sementara itu, pada imunisasi campak, dengan pemberian satu kali imunisasi tidak menunjukkan ketimpangan cakupan yang berarti antara balita perempuan dan laki-laki. Secara umum dapat dikatakan cakupan pemberian imunisasi terhadap balita laki-laki maupun perempuan tidak banyak berbeda. Meski secara umum persentase balita perempuan lebih tinggi dibanding balita laki-laki, namun masih cukup banyak balita yang belum mendapatkan imunisasi baik BCG, DPT, Polio maupun Campak.

4.5 Status Gizi Balita

Pada dasarnya keadaan gizi seorang anak balita adalah hasil interaksi antara faktor biologis dan lingkungan. Faktor biologis yang mempengaruhi adalah jenis kelamin, keadaan saat dalam kandungan, berat badan saat lahir, persalinan kembar atau tunggal, urutan anak dalam keluarga dan faktor genetik. Sedangkan pengaruh faktor lingkungan adalah keadaan sosio-ekonomi, musim/iklim, keadaan tanah, pendidikan, di samping faktor terpenting lainnya seperti makanan dan penyakit infeksi. Dari interaksi berbagai faktor tersebut kondisi gizi balita terlihat seperti pada Tabel 4.6.

Dari Tabel 4.6 terlihat bahwa status gizi balita perempuan lebih baik dibanding laki-laki. Perbedaan status gizi balita laki-laki dan perempuan kemungkinan karena secara biologis balita perempuan lebih baik dibandingkan balita laki-laki.

Tabel 4.6 Persentase Balita menurut Status Gizi dan Jenis Kelamin Tahun 2002

Status Gizi	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Gizi lebih	3,3	2,3	2,8
Normal	74,1	75,7	74,8
Gizi Kurang	17,7	12,1	15,0
Gizi Buruk	4,9	9,9	7,4
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: SGY 2002

4.6 Pemberian ASI

Pemberian ASI pada bayi mutlak diperlukan, ASI dapat menurunkan kejadian pneumonia karena selain bahan nutrisi, ASI juga mengandung anti infeksi atau bahan imunologik serta bahan-bahan lain yang penting dalam mencegah infeksi saluran nafas oleh bakteri dan virus. Berdasarkan hasil Susenas 1999, di Kabupaten Kendari pemberian ASI

kepada anak balita perempuan dan lelaki tidak menunjukkan perlakuan yang berbeda (ketimpangan jender). Ini ditunjukkan oleh tidak berbedanya secara berarti persentase balita perempuan yang mendapat ASI dibanding balita laki-laki, yaitu 98,6 persen berbanding 99,5 persen.

Secara umum pemberian ASI kepada anak di Kabupaten Kendari dilakukan selama 1 sampai 2 tahun. Ditinjau menurut lamanya pemberian ASI, sebagaimana terlihat pada Tabel 4.8 tampak bahwa persentase anak perempuan usia 0-59 bulan yang mendapat ASI lebih dari satu tahun lebih banyak dari anak laki-laki. Berdasarkan data ini maka wajar saja bila balita perempuan lebih baik gizinya dari pada anak laki-laki.

Tabel 4.7 Persentase Penduduk Usia 0-59 Bulan menurut Lamanya Pemberian ASI dan Jenis Kelamin Tahun 2002

Lamanya Pemberian ASI (dalam bulan)	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
1-6	13,9	11,8	12,8
7-12	27,4	18,8	23,0
13-24	42,6	50,0	46,4
24 +	16,1	19,4	17,8
Total	100,0	100,0	100,0

Sumber: Diolah dari Data Kor Susenas 2002

BAB 5.
FORMASI RUMAH TANGGA

<https://sulfid.com/sulfid.com-go.id>

BAB 5. FORMASI RUMAH TANGGA

Komposisi laki-laki dan perempuan di dalam suatu keluarga atau rumah tangga juga mempunyai pengaruh terhadap ditegakkannya kebijakan yang adil di dalam keluarga atau rumah tangga, termasuk pembagian beban tanggung jawab dan pemberian kesempatan. Keluarga yang dikepalai oleh perempuan mungkin mempunyai beban yang lebih besar dari keluarga yang dikepalai laki-laki. Sebagai kepala keluarga ia tidak hanya mengurus rumah tangga tetapi juga harus mencari nafkah. Dalam bab ini digunakan istilah formasi rumah tangga untuk menjelaskan komposisi laki-laki dan perempuan dan pembentukan keluarga (status dan pola perkawinan). Bab ini selanjutnya akan membahas formasi rumah tangga (sebagai pendekatan keluarga), status dan pola perkawinan serta keluarga berencana.

Sebagaimana dijelaskan pada Bab I, suku terbesar di Kabupaten Kendari adalah suku Tolaki. Suku ini menganut sistim hubungan kekerabatan, yang parental sifatnya. Keluarga baru segera membentuk rumah tangga sendiri tak lama setelah pernikahan. Pihak laki-laki harus menyediakan mas kawin yang besarnya disesuaikan dengan kedudukan pihak perempuan dalam masyarakat. Selain itu mas kawin untuk anak perempuan yang paling tua juga lebih besar jumlahnya. Di masa lalu, dalam sistim perkawinan Suku Tolaki dikenal pula adat memberi jasa kepada mertua (*bride services*) untuk waktu tertentu². Oleh karena itu ada kesan adat menetap di kalangan suku ini, sesudah mereka menikah. Jadi tidak mengherankan bila kita lihat proporsi kepala rumah tangga mereka yang lelaki jumlahnya lebih besar dibanding perempuan.

5.1 Formasi Rumah tangga

Keluarga idealnya terdiri dari seorang ayah, ibu dan beberapa anak. Biasanya yang mengepalai rumah tangga adalah suami atau ayah. Namun demikian adakalanya seorang perempuan mengepalai sebuah rumah tangga, karena berpisah (cerai) atau ditinggal mati oleh suaminya, atau karena suami

² Zulyani Hidayah, 1997: Ensiklopedia Suku Bangsa di Indonesia, LP3ES

kurang berperan dalam keluarga, atau apabila suami pergi mencari nafkah jauh dari keluarga dalam jangka waktu yang lama. Di Kabupaten Kendari proporsi perempuan yang menjadi kepala rumah tangga relatif kecil, yaitu sebesar 8,8 persen pada tahun 2002.

Tabel 5.1 Persentase Kepala Rumah Tangga menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan Tahun 2002

Jenis Kelamin	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki	1,4	96,4	0,1	2,1
Perempuan	3,6	15,3	17,5	63,5

Sumber: BPS, Kor Susenas 2002

Pada umumnya laki-laki sebagai kepala rumah tangga berstatus kawin (96,4 persen), sedangkan perempuan berstatus cerai mati (63,5 persen). Disamping itu persentase perempuan yang berstatus belum kawin dan cerai hidup lebih tinggi dibanding kepala rumah tangga laki-laki, seperti terlihat pada Tabel 5.1. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan menjadi kepala rumah tangga karena ia tidak menikah lagi setelah suaminya meninggal dunia, setelah ia bercerai atau hidup sendiri.

Telah disebutkan bahwa hampir seluruh rumah tangga dikepalai laki-laki dan berstatus kawin, sehingga rata-rata anggota rumah tangga yang dikepalai laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan (4,5 orang dibanding 3,2 orang). Sejalan dengan itu kehidupan rumah tangga dari rumah tangga yang dikepalai laki-laki lebih baik dibandingkan perempuan. Hal ini dibuktikan dengan angka persentase anak usia sekolah (7-24 tahun) yang masih bersekolah pada rumah tangga yang dikepalai laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan (Tabel 5.2.)

Tabel 5.2 Persentase Anak yang Masih Sekolah menurut Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga Tahun 2002

Umur Anak	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)
7 – 12	31,8	31,4
13 – 15	62,8	59,1
16 – 18	74,0	73,1
19 – 24	73,3	78,7
7 – 24	71,1	65,7

Sumber: BPS, Kor Susenas 2002

Bila dirinci menurut kelompok usia anak sekolah, maka porsi anak yang masih sekolah pada usia 7-12 tahun di rumah tangga yang dikepalai laki-laki dan perempuan relatif sama. Namun, proporsi anak sekolah usia 13-18 tahun lebih besar pada rumah tangga dengan kepala rumah tangga laki-laki, terutama pada usia 13-15 tahun. Sebaliknya proporsi anak sekolah usia 19-24 tahun lebih tinggi pada rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan dari pada kepala rumah tangga laki-laki (78,7 % berbanding 73,3%).

Hal ini bisa terjadi karena anak pada usia tersebut sekolah di luar daerah. Bagi kepala rumah tangga laki-laki yang mampu menyekolahkan anaknya lebih relatif berani melepas anaknya bersekolah di luar daerah, sedangkan anak yang tinggal di kepala rumah tangga perempuan cenderung tinggal bersama ibunya. Selain karena biaya mungkin juga untuk menjaga sang ibu. Pernyataan tersebut didukung oleh rata-rata pengeluaran rumah tangga, dimana rumah tangga yang dikepalai laki-laki lebih tinggi dibandingkan rumah tangga yang dikepalai perempuan. Hasil Susenas 2002 menunjukkan besarnya pengeluaran rumah tangga yang dikepalai laki-laki lebih besar dari pada perempuan yaitu 533 ribu rupiah dan 405 ribu rupiah.

Sumber penghasilan utama rumah tangga di Kabupaten Kendari baik yang dikepalai laki-laki maupun perempuan adalah dari sektor pertanian, karena sebagian besar wilayah kabupaten ini terdiri dari daerah perdesaan.

Selain dari sektor pertanian rumah tangga yang dikepalai laki-laki juga memperoleh penghasilan dari sektor jasa, sedangkan rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan banyak yang bekerja di sektor perdagangan. Hal ini bisa diartikan bahwa sumber penghasilan rumah tangga laki-laki lebih mapan dari pada rumah tangga yang dikepalai perempuan, karena sebagian besar mereka yang bekerja di sektor jasa adalah sebagai pegawai negeri dan ini merupakan sektor formal, sedangkan sumber penghasilan dari rumah tangga yang dikepalai perempuan kebanyakan dari sektor perdagangan sebagai pedagang kecil yang lebih merupakan sektor non formal.

5.2 Status Perkawinan

Perkawinan adalah pintu masuk bagi laki-laki dan perempuan untuk bersatu mengatur dimensi lain dalam kehidupan mereka, yaitu keluarga atau rumah tangga. Dalam lembaga ini mereka harus dapat saling berperan bahu-membahu menegakkan kehidupan rumah tangga mereka untuk mencapai rumah tangga yang sakinah *baladatum toyyibatun wa rabbun ghofur*.

Tabel 5.3. menyajikan data mengenai status perkawinan penduduk Kabupaten Kendari. Tabel tersebut memperlihatkan bahwa perempuan yang berstatus cerai hidup ada 1,3 persen pada tahun 2000. Keadaan ini tidak menunjukkan perubahan yang berarti hingga tahun 2002. Sementara laki-laki yang berstatus cerai hidup persentasenya kurang dari satu persen, dan keadaan ini juga tidak mengalami perubahan yang berarti, bahkan keadaan tahun 2000 dan tahun 2002 menunjukkan angka yang sama walaupun pada tahun 2001 sempat naik hingga 0,9 persen. Rendahnya persentase laki-laki yang berstatus cerai hidup dibanding perempuan mungkin disebabkan karena laki-laki lebih cepat memutuskan untuk menikah lagi dibandingkan perempuan.

Tabel 5.3 juga memperlihatkan bahwa perempuan yang berstatus cerai mati persentasenya lebih tinggi dibanding laki-laki. Namun keadaan ini terlihat menurun pada tahun 2002 menjadi sebesar 4,6 dibanding tahun 2000 yang mencapai 5,2 persen. Sedangkan laki-laki yang berstatus cerai mati persentasenya kurang dari dua persen, dan angka ini juga sedikit mengalami

penurunan dari 1,3 persen tahun 2000 menjadi 1,2 pada tahun 2002. Penyebab timpangnya angka cerai mati antara perempuan dengan laki-laki tersebut kemungkinan karena angka harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki.

Hal lain yang diperlihatkan oleh Tabel 5.3 adalah bahwa sejak periode tahun 2000-2002 perempuan yang berstatus kawin persentasenya lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki.

Tabel 5.3 Persentase Penduduk menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin Tahun 2000-2002

Status Perkawinan/ Jenis Kelamin	2000	2001	2002
(1)	(2)	(3)	(4)
Belum Kawin:			
Laki-laki	56,9	55,9	56,4
Perempuan	49,6	49,6	48,4
Kawin:			
Laki-laki	41,4	41,9	42,0
Perempuan	43,9	45,2	45,5
Cerai Hidup:			
Laki-laki	0,4	0,9	0,4
Perempuan	1,3	1,0	1,5
Cerai Mati:			
Laki-laki	1,3	1,4	1,3
Perempuan	5,2	4,3	4,6

Sumber: BPS, Susenas 2000, 2001, 2002

5.3 Pola Perkawinan

Persentase perempuan pernah kawin berumur 10 tahun keatas menurut umur perkawinan pertama di Kabupaten Kendari disajikan pada Tabel 5.4. Melihat tabel tersebut tampak bahwa perempuan yang melangsungkan perkawinan pertama kali pada usia muda (10 -16 tahun) mencapai 23,3 persen tahun 2000. Keadaannya kemudian berangsur

menurun untuk tahun-tahun berikutnya hingga persentasenya tinggal 20,8 persen pada tahun 2002.

Masih tingginya persentase perempuan yang melangsungkan perkawinan pada umur muda tentu sangat memprihatinkan, karena risiko yang akan mereka alami cukup besar baik fisik maupun mental. Secara fisik perempuan yang berumur muda belum siap untuk melahirkan anak, dan apabila hal itu terjadi maka risiko gangguan kelangsungan hidup, baik bagi ibu maupun anaknya sangat besar. Umumnya usia yang cukup aman untuk melangsungkan perkawinan adalah antara 20-35 tahun.

Tabel 5.4 Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 10 Tahun Keatas menurut Umur Perkawinan Pertama Tahun 2000 - 2002

Tahun	Umur Perkawinan Pertama			
	< 16	17	18	19+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2000	23,34	12,29	13,83	50,54
2001	21,01	13,22	14,97	50,80
2002	20,80	11,51	14,87	52,82

Sumber: BPS, Susenas 2000, 2001, 2002

5.4 Keluarga Berencana

Ketimpangan gender dalam program Keluarga Berencana (KB) akan nampak jika kita melihat proporsi penduduk usia produktif menurut pemakaian alat/cara KB. Perempuan lebih banyak berpartisipasi dalam ber KB daripada laki-laki dengan banyaknya alat/cara KB yang dikhususkan untuk perempuan, seperti MOW, AKDR/TUD, suntik, susuk, dan pil, sedangkan bagi laki-laki hanya tersedia MOP dan kondom, selain cara tradisional.

Tabel 5.5. memberikan gambaran mengenai perkembangan perempuan berusia 15-49 tahun yang berstatus kawin dan pernah menggunakan alat/cara KB menurut kelompok umur dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2002.

Secara umum setiap tahunnya sekitar 65 sampai dengan 71 persen perempuan ini menyatakan pernah menggunakan alat/cara KB. Hal lain yang terlihat pada tabel di atas bahwa pada wanita usia subur pola pemakaian alat/cara KB membentuk grafik seperti huruf "U" terbalik. Kelompok umur 15-19 tahun mempunyai persentase yang lebih rendah dibandingkan dengan kelompok umur lain, terus meningkat sampai puncaknya pada kelompok umur 30-34 tahun, namun kemudian menurun kembali.

Pada tahun 2002 hasil Susenas menunjukkan lebih dari 90 persen perempuan berpartisipasi menggunakan alat/cara KB. Sementara laki-laki yang aktif melakukan KB dengan menggunakan alat/cara KB dengan vasektomi (MOP) dan kondom, setiap tahun dalam periode 2000-2001, persentasenya relatif kecil tidak sampai 1 persen. Sekitar 2 persen sisanya menyatakan menggunakan alat/cara KB tradisional dan lainnya, namun tidak jelas siapa yang aktif menggunakan alat/cara KB ini apakah perempuan atau laki-laki (lihat Tabel 5.6).

Tabel 5.5 Perkembangan Penduduk Perempuan Usia 15-49 Tahun Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan Alat KB menurut Umur (Tahun) Tahun 2000-2002

Umur	2000	2001	2002
(1)	(2)	(3)	(4)
15 - 19	31,80	31,43	27,50
20 - 24	62,76	59,11	59,13
25 - 29	74,04	73,08	76,20
30 - 34	73,29	78,70	81,58
35 - 39	82,64	69,83	75,45
40 - 44	73,35	53,71	69,86
45 - 49	61,24	54,03	62,65
15 - 49	71,05	65,71	70,11

Sumber: BPS, Susenas 2000, 2001, 2002

Tabel 5.6 Perkembangan Penduduk Perempuan Berstatus Kawin Usia 15-49 Tahun menurut Kontrasepsi KB Yang Sedang Digunakan Tahun 2000-2002

Jenis Alat Kontrasepsi	2000	2001	2002
(1)	(2)	(3)	(4)
MOP/Vasektomi	0,6	0,7	0,3
Kondom	-	-	0,3
MOW/Tubektomi	1,8	1,5	5,4
AKDR/IUD	5,2	5,2	3,7
Suntikan KB	24,1	24,7	30,4
Susuk KB	33,6	31,6	22,2
Pil KB	33,7	35,6	35,1
Lainnya	-	-	0,2
Tradisional	1,0	0,8	2,4

Sumber: BPS, Susenas 2000, 2001, 2002

BAB 6.
KEGIATAN EKONOMI

<https://sulfid.com.go.id>

BAB 6. KEGIATAN EKONOMI

Dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (2) dinyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Namun dalam kenyataannya apa yang digariskan dalam undang-undang dasar tersebut belum berjalan dengan semestinya. Kesempatan memperoleh pekerjaan di sektor-sektor tertentu antara laki-laki dengan perempuan masih timpang dan imbalan jasa yang diterima juga tidak sama. Bab ini selanjutnya akan membahas Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan.

6.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran

TPAK dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara angkatan kerja dengan penduduk usia kerja. Angkatan kerja mencakup penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan dan penduduk usia kerja adalah penduduk usia 15 tahun keatas. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) didefinisikan sebagai perbandingan antara penduduk yang mencari pekerjaan dengan angkatan kerja. Data mengenai TPAK dan TPT di Kabupaten Kendari disajikan pada Tabel 6.1.

a) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

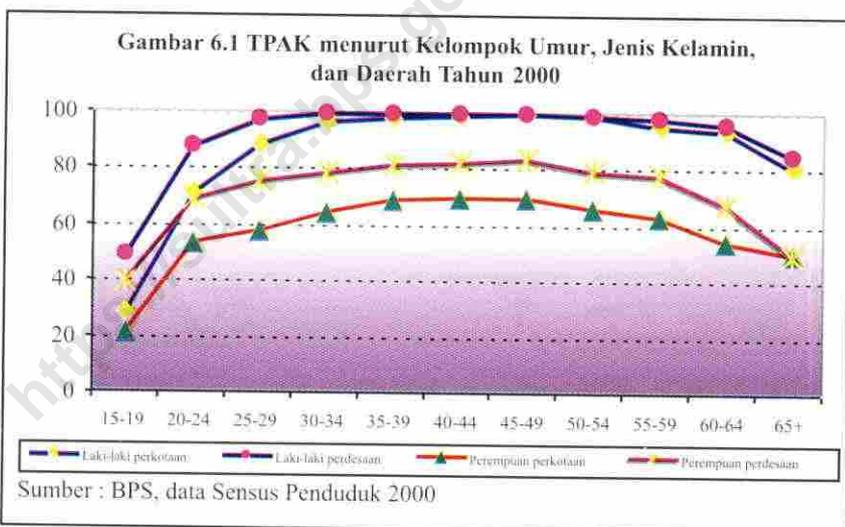
TPAK menggambarkan porsi keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi, baik yang terserap dalam pasar kerja (bekerja) maupun yang tidak (mencari kerja). Secara umum TPAK perempuan lebih rendah dari laki-laki. Pada tahun 2000 TPAK perempuan dan laki-laki masing-masing sekitar 68 dan 87 persen. Perbedaan yang demikian besar mungkin saja didorong oleh relatif rendahnya pendidikan kaum perempuan. Dari sekitar 32 persen yang tidak termasuk angkatan kerja, lebih dari separuhnya (lihat Kendari Dalam Angka 2000) berpendidikan maksimal SD. Kondisi ini membuat angkatan kerja perempuan tidak kompetitif.

Ditilik menurut wilayah, TPAK di daerah perkotaan lebih timpang dari perdesaan. Di perdesaan TPAK perempuan dan laki-laki masing-masing sekitar 69 persen dan 87 persen, sedang di perkotaan sekitar 52 persen untuk perempuan dan 78 persen untuk laki-laki.

Tabel 6.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Wilayah dan Jenis Kelamin Tahun 2000

Wilayah	Laki-laki	Perempuan	Total	Rasio Angkatan Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan	77,9	52,2	64,8	0,7
Perdesaan	87,0	68,6	78,0	0,8
Total	86,6	67,7	77,3	0,7

Sumber: BPS, Data Sensus Penduduk 2000



Rasio angkatan kerja perempuan terhadap laki-laki menunjukkan kesenjangan gender di bidang ekonomi. Di Kabupaten Kendari bisa dikategorikan cukup rendah (0,7). Artinya, dari 17 orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi 7 diantaranya adalah perempuan. Kesenjangan gender di daerah perdesaan lebih rendah dibandingkan daerah perkotaan. Kemungkinan besar karena porsi perempuan perkotaan yang sekolah (15,17

persen) dan mengurus rumah tangga³ (32,62 %) lebih tinggi dibandingkan perempuan perkotaan (7,83 % dan 23,59 %). TPAK menurut kelompok umur dan jenis kelamin di daerah perkotaan dan perdesaan disajikan dalam Gambar 6.1. Perbedaan antara TPAK perempuan dan laki-laki lebih besar di daerah perkotaan dibanding perdesaan.

b) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan di daerah perdesaan. Kondisi ini kemungkinan didorong oleh lebih ketatnya persaingan memasuki pasar kerja di perkotaan, pada sisi lain di perdesaan yang berbasis pertanian secara umum tidak menuntut persyaratan khusus untuk mendapatkan pekerjaan.

Tabel 6.2 Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Wilayah dan Jenis Kelamin Tahun 2000

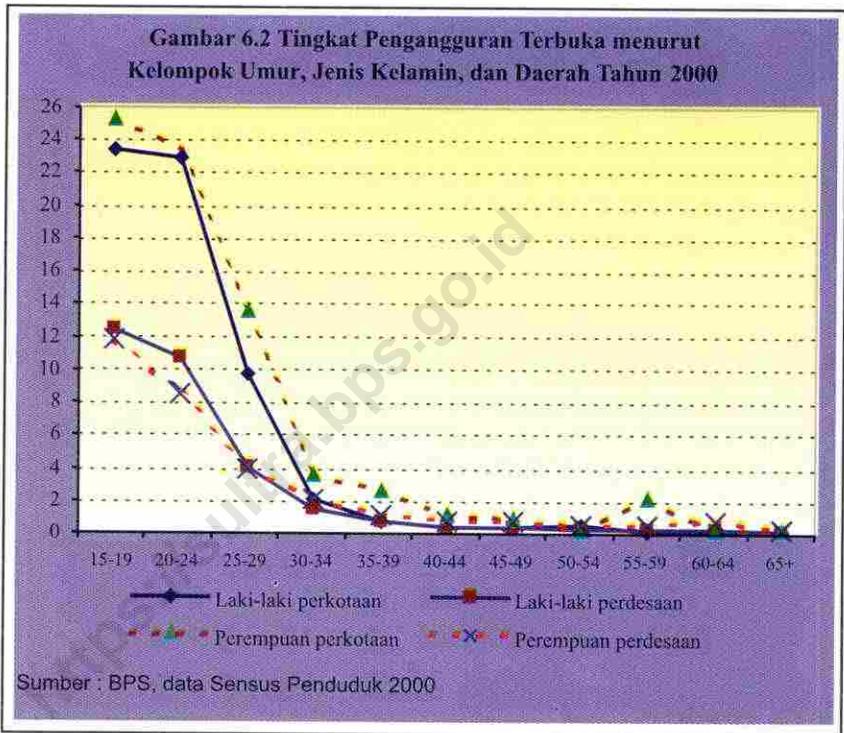
Wilayah	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Perdesaan	3,59	3,61	3,60
Perkotaan	6,27	8,65	7,24
Total	3,71	3,81	3,76

Sumber: BPS, data Sensus Penduduk 2000

Tabel 6.2. memperlihatkan bahwa TPT perempuan baik di perdesaan maupun di perkotaan lebih tinggi dari laki-laki. Bila perempuan tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai kemungkinan akan lebih condong memilih "mengurus rumah tangga". Padahal "pekerjaan" mengurus rumah tangga tidak pernah diberi nilai dalam teori ekonomi yang berlaku selama ini, meski perempuan menyumbang banyak arti bagi pembangunan yang langsung.

³ Dalam SP-2000, mengurus rumah tangga termasuk dalam kategori lainnya

TPT menurut kelompok umur di daerah perkotaan maupun daerah perdesaan, baik untuk perempuan maupun laki-laki memiliki pola yang relatif sama. TPT tertinggi terlihat pada kelompok umur 15-19 tahun, kemudian mengalami penurunan hingga usia 30-34 tahun, dan selanjutnya mendatar pada kelompok umur berikutnya. Pada kelompok umur 40-44 dan seterusnya TPT berada pada kisaran nol persen.



6.2 Lapangan dan Status Pekerjaan

Kesetaraan jender dalam pasar kerja dapat dilihat dari lapangan kerja dan status dalam pekerjaan. Semakin baik kesetaraan jender dalam pasar kerja semakin banyak perempuan yang terlibat dalam pembangunan. Meskipun demikian kesetaraan sukar sekali dicapai karena perempuan mempunyai peran yang tidak bisa diganti oleh laki-laki, yaitu peran

reproduktif (hamil, melahirkan dan menyusui). Kondisi ini membuat kaum perempuan “sukar” masuk ke dalam pasar kerja.

a. Lapangan Pekerjaan

Secara umum penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di Kabupaten Kendari pada tahun 2000 berjumlah 20.916 jiwa, terdiri dari 89.836 perempuan dan 120.080 laki-laki atau 3 berbanding 4. Perempuan paling banyak bekerja pada sektor pertanian. Ada sekitar 76,8 persen yang bekerja di sektor ini terutama pada subsektor pertanian tanaman pangan (45,4 persen) dan subsektor perkebunan (23,5 persen). Pola yang sama juga dijumpai pada pekerja laki-laki.

Tabel 6.3 Penduduk Yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Tahun 2000

Lapangan Pekerjaan	Perkotaan			Perdesaan		
	Perempuan	Laki-laki	Rasio Pekerja	Perempuan	Laki-laki	Rasio Pekerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertanian tanaman pangan	311	405	0,8	40.501	48.965	0,8
Perkebunan	250	348	0,7	20.856	27.489	0,8
Perikanan	366	568	0,6	1.882	6.322	0,3
Peternakan	2	18	0,1	311	348	0,9
Pertanian lainnya	83	217	0,4	4.393	6.520	0,7
Industri pengolahan	162	232	0,7	1.635	3.742	0,4
Perdagangan	894	1.097	0,8	5.519	4.034	1,4
Jasa	773	1.582	0,5	3.877	11.491	0,3
Angkutan	12	241	0,05	149	1.977	0,08
Lainnya	643	477	1,3	7.217	4.007	1,8
Total	3.496	5.185	0,7	86.340	114.895	0,8

Sumber: BPS, Data Sensus Penduduk 2000

Perbandingan jumlah pekerja perempuan terhadap pekerja laki-laki diperlihatkan oleh rasio pekerja perempuan terhadap pekerja laki-laki yang selanjutnya disebut rasio pekerja. Rasio pekerja di perkotaan mencapai

sekitar 0,7 yang berarti pada setiap 17 pekerja terdapat 10 pekerja laki-laki dan 7 pekerja perempuan. Rasio pekerja di perdesaan sedikit lebih tinggi yaitu sebesar 0,8, artinya pada setiap 18 pekerja, 10 diantaranya adalah laki-laki dan 8 perempuan. Bila dirinci menurut lapangan usaha, maka pada sektor lainnya baik di perkotaan maupun di perdesaan, rasio pekerja yang lebih dari 1. Di sektor ini pekerja perempuan lebih banyak ketimbang laki-laki. Padahal sektor ini adalah kumpulan dari sektor pertambangan, listrik/gas dan air, keuangan/persewaan dan jasa perusahaan seperti terlihat pada Tabel 6.3. Pada tabel yang sama, terlihat bahwa di daerah perkotaan rasio pekerja di sektor perdagangan lebih dari 1. Artinya bahwa proporsi perempuan yang bekerja disektor ini lebih besar dari pada laki-laki.

Sektor yang paling sedikit dimasuki perempuan adalah sektor angkutan. Di daerah perkotaan perbandingan antar pekerja laki-laki dan perempuan adalah 1 berbanding 20, sedangkan di daerah perdesaan perbandingannya adalah 2 berbanding 25. Kesenjangan jender di sektor ini kemungkinan memerlukan waktu yang cukup lama untuk berubah karena perempuan sendiri jarang yang mau menjadi sopir atau kondektur kendaraan umum, kecuali menjadi pramugari.

b. Status Pekerjaan

Hasil Sensus Penduduk 2000 di Kabupaten Kendari menunjukkan sebagian besar (70 %) pekerja perempuan berstatus sebagai pekerja tidak dibayar. Di perdesaan sekitar 71 persen pekerja perempuan berstatus sebagai buruh tidak dibayar, 18 persen berusaha/bekerja sendiri dan sisanya berstatus sebagai buruh/pekerja dibayar, berusaha dengan buruh tidak tetap dan buruh tetap dengan proporsi masing-masing di bawah 10 persen. Di perkotaan proporsi pekerja perempuan yang tidak dibayar lebih kecil dibandingkan dengan perdesaan yaitu 55,3 persen berbanding 70,5 persen.

Tabel 6.4 Persentase Penduduk Sebagai Tenaga Tidak Dibayar menurut Wilayah dan Jenis Kelamin Tahun 2000

Sektor Usaha	Kota		Desa	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pertanian tanaman pangan	6,69	1,23	36,71	7,61
Perkebunan	5,32	1,83	19,83	4,91
Perikanan	9,81	2,97	1,83	0,65
Peternakan	0,03	0,08	0,16	0,06
Pertanian lainnya	1,49	0,25	3,23	0,75
Industri pengolahan	2,52	0,25	0,97	0,23
Perdagangan	14,96	3,22	2,32	0,30
Jasa	0,80	0,21	0,34	0,10
Angkutan	0,17	0,06	0,05	0,06
Lainnya	13,50	2,28	5,02	0,93
Jumlah	55,29	12,38	70,48	15,60

Sumber: BPS Sensus Penduduk 2000

Bila dirinci menurut lapangan usaha, maka proporsi pekerja perempuan yang tidak dibayar di semua sektor lebih tinggi dibandingkan pekerja laki-laki (lihat Tabel 6.5). Sektor yang paling tampak ketimpangan jendernya adalah pertanian tanaman pangan, jasa di daerah perkotaan dan sektor perikanan serta perkebunan di daerah perdesaan. Ketimpangan jender di sektor pertanian, baik di daerah perkotaan maupun di perdesaan kemungkinan besar berkaitan dengan kepemilikan lahan pertanian, yang umumnya dimiliki atau dikuasai kaum laki-laki (kepala rumah tangga).

Berbeda dengan pekerja perempuan, proporsi paling besar dari pekerja laki-laki adalah berstatus berusaha dibantu dengan buruh tidak tetap yakni sekitar 41 persen. Hal ini terutama dijumpai di daerah perdesaan. Di perkotaan justru status pekerja terbesar (36,51 persen) adalah sebagai buruh/karyawan/pekerja dibayar menyusul mereka yang berusaha/bekerja sendiri sekitar 30,43 persen. Di daerah perdesaan 42 persen pekerja laki-laki

berusaha dibantu oleh buruh tidak tetap, 27 persen berusaha/bekerja sendiri dan sisanya bekerja dengan status pekerjaan lainnya.

Status pekerjaan yang terkecil proporsinya adalah berusaha dibantu dengan buruh tetap yaitu 0,75 persen dari pekerja laki-laki dan 0,22 persen dari pekerja perempuan. Karena sebagian besar pekerja berada di daerah perdesaan maka kondisi ini lebih mencerminkan kondisi perdesaan. Di perkotaan kondisinya tidak banyak berbeda. Proporsi pekerja laki-laki yang berusaha dibantu buruh tetap lebih besar dari pada perempuan yakni 0,16 persen dari pekerja laki-laki dan 0,9 persen dari pekerja perempuan.

Tabel 6.5 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas menurut Status Pekerjaan, Daerah, dan Jenis Kelamin

Status Pekerjaan	Perkotaan		Perdesaan		Kendari	
	Perem- puan	Laki- laki	Perem- puan	Laki- laki	Perem- puan	Laki- laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Berusaha/bekerja sendiri	17,1	30,4	17,7	26,9	17,7	27,1
Berusaha dibantu dengan buruh tidak tetap	4,1	19,1	5,5	41,8	5,5	40,8
Berusaha dibantu dengan buruh tetap	0,9	1,6	0,2	0,7	0,2	0,8
Buruh/karyawan/pekerja dibayar	22,6	36,5	6,1	15,0	6,7	15,9
Pekerja tidak dibayar	55,3	12,4	70,5	15,6	69,9	15,5
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber : BPS, Sensus Penduduk 2000

6.3 Jam Kerja, Upah, dan Gaji

a) Jam kerja

Semakin "lama" bekerja, seseorang relatif akan lebih banyak menghasilkan/mencapai sesuatu yang diinginkan. Karena itu rata-rata jam kerja per satuan waktu (hari/minggu/bulan) dapat menggambarkan

produktivitas seorang. Di Kabupaten Kendari, jam kerja rata-rata perminggu pada tahun 2002 (Tabel 6.6) pekerja sekitar 41,3 jam atau sekitar 5,9 jam perhari. Pekerja perempuan memiliki jam kerja yang lebih rendah dari laki-laki, masing-masing sekitar 37,8 jam dan 42,6 jam perminggu atau sekitar 5,4 jam dan 6,1 jam perhari. Beberapa keterbatasan kaum perempuan seperti adanya fungsi reproduksi juga termasuk kesibukan mengurus rumah tangga, kemungkinan sebagai faktor yang mendorong perbedaan jam kerja tersebut dan itu tidak dinilai sebagai jam kerja.

b) Upah/Gaji sebulan

Upah/gaji merupakan balas jasa buruh/pekerja atas pekerjaan yang dilakukan/dihasilkan dalam satu satuan waktu (biasanya 1 bulan). Karenanya upah/gaji pada dasarnya merupakan nilai dari hasil kerja seseorang. Di Kabupaten Kendari pada tahun 2002, rata-rata upah buruh/pekerja sekitar 710 ribu rupiah per bulan. Perempuan menerima sekitar 672 ribu rupiah per bulan, sedangkan laki-laki sekitar 723 ribu rupiah.

Perbedaan upah per bulan belum dapat dijadikan dasar untuk menilai adanya ketimpangan gender. Untuk menilai ketimpangan secara terukur, upah/gaji ditimbang dengan jumlah jam kerja. Secara umum besarnya upah/gaji per jam di Kabupaten Kendari sekitar 4 ribu rupiah. Besaran upah/gaji tersebut untuk laki-laki dan perempuan relatif sama, masing-masing 3,96 ribu rupiah (dibulatkan 4 ribu rupiah) dan 4.15 rupiah (dibulatkan 4 ribu rupiah). Dari kenyataan ini dapatlah dikatakan bahwa perlakuan pengupahan/penggajian bagi pekerja laki-laki ataupun perempuan di Kabupaten Kendari relatif tidak berbeda.

Tabel 6.6 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Rata-rata Jam Kerja dan Upah Tahun 2002

Jenis Kelamin	Jam Kerja (minggu)	Upah/bulan (Rp)	Upah/Jam (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki	42,58	723.113	3.963
Perempuan	37,75	672.012	4.154
Jumlah	41,33	709.938	4.008
Rasio	0,9	0,9	1,0

Sumber: Kor Susenas 2002

Ketimpangan gender di bidang ekonomi, diawali dari perlakuan keluarga terhadap anak laki-laki atau perempuan mereka. Kalau keluarga kekurangan biaya hidup maka anak laki-lakilah yang harus membantu mencari nafkah, sedangkan anak perempuan mengurus rumah tangga. Berdasarkan hasil Susenas 2001, persentase anak laki-laki (5-14 tahun) yang bekerja untuk mendapatkan uang ada sebanyak 66 persen, sedangkan persentase anak perempuan hanya sebesar 2,6 persen. Sementara itu, persentase anak perempuan (5-14 tahun) yang bekerja di rumah lebih dari 4 jam sehari dua kali lebih besar dari pada persentase anak laki-laki (0,14% berbanding 0,07 %).

BAB 7.
SEKTOR PUBLIK

<https://sulfid.com.go.id>

BAB 7. SEKTOR PUBLIK

Dewasa ini pandangan kaum perempuan banyak mengalami pergeseran. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan semakin banyaknya perempuan yang ikut dalam menentukan arah dan gerak dari pembangunan bangsa. Perempuan hadir tidak hanya pada lembaga legislatif, tetapi juga pada lembaga eksekutif. Fenomena ini terlihat tidak hanya di pusat tetapi juga di daerah. Bab ini selanjutnya akan membahas tentang keberadaan perempuan dalam lembaga legislatif, eksekutif, dan sebagai pegawai negeri baik sipil maupun TNI/Polri di Kabupaten Kendari.

7.1 Politik dan Legislatif

Komposisi anggota DPRD menurut jenis kelamin di suatu daerah dapat mencerminkan tentang besarnya penerapan azas demokrasi di daerah tersebut. Dengan komposisi penduduk yang hampir berimbang antara jumlah perempuan dan laki-laki, maka komposisi anggota DPRD -pun seyogyanya juga seimbang. Namun semua itu tergantung dari sistem yang berlaku dan perempuan itu sendiri, dimana pada era reformasi sekarang ini perempuan diharapkan untuk berkiprah termasuk pada bidang politik .

Tabel 7.1 Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Kendari Tahun 2001

Partai Politik	Perempuan	Laki-laki	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
PDIP	-	5	5
MADANI	-	7	7
P. GOLKAR	3	21	24
TNI-POLRI	-	4	4
Jumlah	3	37	40

Sumber : DPRD Kab. Kendari

Namun kenyataannya hal seperti itu masih jauh dari apa yang diharapkan. Keanggotaan DPRD masih didominasi oleh kaum laki-laki, seperti yang diperlihatkan pada Tabel 7.1. Dari Tabel tersebut tampak bahwa dari 40 anggota DPRD Kabupaten Kendari, hanya 3 diantaranya kaum perempuan dan sisanya adalah laki-laki. Jika dilihat dari komposisi keanggotaan pada masing-masing partai politik, maka hanya keanggotaan partai Golkar yang melibatkan perempuan. Sementara pada partai lainnya termasuk TNI/Polri belum melibatkan perempuan. Ketimpangan ini mungkin disebabkan oleh kurangnya minat kaum perempuan khususnya di Kabupaten Kendari untuk terjun di dunia politik.

7.2 Perempuan dan Laki-laki Pegawai Negeri Sipil

Seiring dengan semakin meningkatnya pendidikan perempuan, maka semakin banyak pula bidang pekerjaan yang bisa dimasuki oleh kaum perempuan. Salah satu bidang tersebut adalah terjun bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Bahkan sebahagian diantaranya tidak saja menjadi pejabat struktural, tetapi juga menjadi pemimpin suatu instansi. Gambaran mengenai PNS di Kabupaten Kendari dapat dilihat pada Tabel 7.2.

Tabel 7.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Kendari Tahun 2002

Golongan	Perempuan	Laki-laki	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
I	90 (19,6%)	368 (80,4 %)	458
II	528 (12,0 %)	3.872 (88,0 %)	4.400
III	530 (8,0 %)	6.130 (92,0 %)	6.660
IV	0 (0 %)	261 (100 %)	261
Jumlah	1.148 (9,8 %)	10.631 (90,2 %)	11.779

Sumber: Bag. PP dan Bina Sosial Kab. Kendari,

Jumlah PNS di Kabupaten Kendari pada tahun 2002 sebanyak 11.779 orang. Dari jumlah tersebut 1.148 orang diantaranya adalah perempuan, dan sisanya adalah laki-laki atau 90 persen lebih dari total PNS Kabupaten Kendari.

Tabel 7.3 memperlihatkan komposisi PNS di Kabupaten Kendari yang menduduki jabatan struktural. Dari tabel tersebut tampak bahwa perempuan yang menduduki jabatan pada tahun 2002 hanya sekitar 3,4 persen dibanding laki-laki yang mencapai 96,6 persen. Pada tingkat eselon II perempuan yang menduduki jabatan sebanyak 2 orang, dimana kedua pejabat tersebut satu menjabat sebagai kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kendari dan satu orang lagi menjabat sebagai Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kendari. Jadi secara keseluruhan terlihat bahwa perempuan yang menduduki jabatan struktural sangat timpang di semua eselon. Ketimpangan antara PNS perempuan dan laki-laki di Kabupaten Kendari baik dilihat dari golongan maupun jabatan struktural mungkin disebabkan karena jumlah PNS perempuan lebih sedikit dibanding laki-laki, sebagai akibat struktur sosial budaya masa lalu yang belum menuntut kaum perempuan untuk bersekolah ke tingkatan yang lebih tinggi, sehingga memperkecil kesempatan kaum perempuan untuk memasuki pasar kerja, termasuk PNS.

Tabel 7.3 Persebaran Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Struktural Tahun 1997-1999

Eselon	Perempuan	Laki-laki	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
I	-	-	-
II	2 (6,9 %)	27 (93,1 %)	29
III	8 (4,2 %)	183 (95,8 %)	191
IV	35 (3,2 %)	1.072 (96,8 %)	1.107
Jumlah	45 (3,4 %)	1.282 (96,6 %)	1.327

Sumber: Bagian Pemberdayaan Perempuan & Bina Sosial Kab. Kendari, Profil Peranan dan Kedudukan Perempuan

7.3 Bidang Pemerintahan dan Peradilan

Komposisi pejabat eksekutif di Kabupaten Kendari disajikan pada tabel 7.4. Dari tabel tersebut terlihat bahwa dari 23 Kecamatan yang ada, tidak satu-pun kecamatan yang dipimpin oleh perempuan. Ketimpangan ini terjadi karena dari 530 orang perempuan yang bergolongan III masih relatif kecil yang memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan camat atau yang setingkat. Demikian pula pada tingkat desa/kelurahan ketimpangan antara perempuan dan laki-laki sangat jelas terlihat. Dari 642 desa/kelurahan yang tersebar di Kabupaten Kendari hanya 25 desa yang dipimpin oleh perempuan atau sekitar 3,9 persen. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya tokoh perempuan perdesaan yang bisa menjadi panutan masyarakat seperti halnya pada kaum laki-laki. Hal yang sama terjadi pula pada jabatan kepala UPT, sekretaris desa/kelurahan, aparat kelurahan, dan aparat desa, dimana ketimpangan antara perempuan dan laki-laki cukup tinggi. Pada jabatan kepala UPT sama sekali belum melibatkan perempuan, sementara persentase perempuan yang menjabat sebagai sekretaris desa/kelurahan hanya sekitar 1,3 persen.

Tabel 7.4 Komposisi Jabatan Eksekutif menurut Jenis Kelamin Tahun 2002

Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Camat	23	0	23	0,0
2. Kepala Desa/lurah	622	25	647	3,9
3. Kepala UPT	7	0	7	0,0
4. Sekretaris Desa/Kelurahan	621	8	629	1,3
5. Aparat Kelurahan	164	33	197	16,8
6. Aparat Desa	2485	34	2519	1,4

Sumber: Bagian Pemberdayaan Perempuan & Bina Sosial Kab. Kendari, BPS: Angka Sementara Podes SP-2003.

Di bidang hukum, peran dan posisi perempuan diharapkan lebih menonjol, karena bidang ini merupakan garda terdepan dalam menempatkan

perempuan pada posisi yang terhormat. Tabel 7.5. menyajikan komposisi jabatan di bidang hukum menurut jenis kelamin di Kabupaten Kendari. Dari tabel tersebut tampak bahwa di Kabupaten Kendari tahun 2002 hanya terdapat 1 orang notaris perempuan. Sementara yang menjabat baik sebagai jaksa maupun sebagai pengacara belum ada peran perempuan. Hal ini disebabkan karena di Kabupaten Kendari belum mempunyai Kantor Pengadilan Negeri, sehingga para praktisi hukum masih berdomisili atau berkantor di Kota Kendari.

Tabel 7.5 Komposisi Jabatan di Bidang Hukum menurut Jenis Kelamin Tahun 2002

Jabatan	Perem- puan	Laki- laki	Total	Persentase Perem- puan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengacara	0	4	4	0,0
Notaris	1	2	3	33,3
Jaksa	0	2	2	0,0
Hakim Pengadilan Negeri	0	0	0	0,0
Jumlah	1	8	9	11,1

Sumber: Bagian Pemberdayaan Perempuan & Bina Sosial Kab. Kendari, Profil Peranan dan Kedudukan Perempuan.

BAB 8.
MANAJEMEN LINGKUNGAN

<https://sulfid.com/ps-go.id>

BAB 8. MANAJEMEN LINGKUNGAN

8.1 Keterlibatan Dalam Manajemen Lingkungan

Bila dilihat dari komposisi penduduk Kabupaten Kendari dimana jumlah penduduk perempuan hampir sebanding dengan penduduk laki-laki, maka keterlibatan keduanya untuk berbagai peran dalam bidang manajemen lingkungan seyogyanya juga akan sebanding. Perempuan pada umumnya belum banyak berperan dalam pelestarian lingkungan, bahkan dalam pelaksanaan penyuluhan tentang pelestarian lingkungan hidup secara umum yang dilakukan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Kendari selama tahun 2002, belum melibatkan perempuan.

Indikasi yang dapat dijadikan tolok ukur tentang keterlibatan perempuan dalam manajemen lingkungan adalah Pemberian Penghargaan Kalpataru kepada perempuan. Di Kabupaten Kendari, informasi tentang keterlibatan perempuan dalam manajemen lingkungan tidak tersedia datanya, namun demikian ada informasi bahwa perempuan di Kabupaten Kendari belum pernah menerima penghargaan dalam bidang lingkungan, baik untuk tingkat daerah maupun tingkat nasional berupa kalpataru. Ini tidak berarti bahwa kaum perempuan di Kabupaten Kendari tidak pernah terlibat dalam mengelola lingkungan, padahal perempuan banyak berperan mengurus lingkungan seperti menjaga kebersihan rumah, dan kebersihan lingkungan.

8.2 Perempuan Sebagai Pengguna Sumber Daya Alam

Penggunaan sumber daya alam pada rumah tangga meliputi berbagai kebutuhan rumah tangga mulai dari bahan rumah tinggal seperti atap, dinding, dan lantai sampai dengan penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari seperti air dan bahan bakar untuk memasak, erat kaitannya dengan keputusan

perempuan, baik ketika sebagai kepala rumah tangga atau sebagai ibu rumah tangga.

Pengadaan air untuk kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga menjadi beban keseharian perempuan. Bahkan guna memenuhi kebutuhan air rumah tangganya tak jarang perempuan harus menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan air. Akses penduduk Kabupaten Kendari ke fasilitas air bersih tahun 1999 sekitar 47,8 persen, relatif tinggi dibanding Sulawesi Tenggara sebesar 43,6 persen.

Dilihat dari akses rumah tangga untuk mendapatkan air bersih tahun 1996 sekitar 71,6 persen, sedang tahun 1999 hanya sekitar 52,2 persen. Penurunan ini disebabkan oleh musim kemarau yang berkepanjangan sehingga sumur yang sebagian besar digunakan oleh rumah tangga di Kabupaten Kendari menjadi kering dan menyulitkan rumah tangga untuk memperoleh air bersih. Akibatnya kaum perempuan terpaksa mengambil air dari tempat atau sumber air bersih yang letaknya lebih jauh dari sumber semula.

Keterkaitan perempuan dalam penggunaan sumber daya alam yang lain adalah penggunaan kayu bakar untuk memasak. Ancaman deforestasi dari aktivitas perempuan terhadap pencarian kayu bakar ini tidak dapat diabaikan karena lebih dari 50 persen rumah tangga di Kabupaten Kendari masih menggunakan kayu bakar untuk memasak. Pekerjaan mengambil dan mengumpulkan kayu bakar tersebut banyak dilakukan oleh kaum perempuan.

Pemanfaatan sumber daya alam yang lain adalah berkaitan dengan bahan pokok untuk rumah tinggal yang sebagian besar berasal dari sumber daya alam, seperti kayu yang diperoleh dari menebang hutan dan pemanfaatan sumber daya alam lainnya seperti bahan galian (pasir, batu, dan sebagainya) yang sebagian besar diperoleh melalui pengerukan dasar sungai yang tersebar di Kabupaten Kendari. Tindakan ini tanpa disadari telah

merusak lingkungan hidup yang pada gilirannya akan mengandung bahaya/bencana pada penduduk sekitarnya seperti terjadinya tanah longsor, banjir dan lain sebagainya.

Perbedaan jenis bahan untuk rumah tinggal yang digunakan oleh rumah tangga yang dikepalai perempuan dan laki-laki berkaitan dengan kemampuan daya beli antara keduanya. Rumah tangga yang dikepalai perempuan relatif lebih rendah kemampuan ekonominya, sehingga hanya mampu menggunakan bahan yang relatif lebih murah.

8.3 Perempuan sebagai Konsumen Bahan Pencemar

Dalam kehidupan sehari-hari, perempuan berperan sebagai pengguna utama berbagai barang-barang kebutuhan rumah tangga yang sesungguhnya banyak mengandung bahan beracun seperti pengharum ruangan, spray rambut, pembasmi hama, pembersih lantai, pembersih kaca, penghilang noda dan bahan beracun lainnya. Pengambilan keputusan pembelian dan penggunaan barang tersebut dapat dipastikan ada pada perempuan. Perempuan akan cenderung mengkonsumsi barang-barang kebutuhan tersebut bila keadaan ekonomi mereka membaik.

Di Kabupaten Kendari penggunaan bahan-bahan kosmetik seperti spray rambut, bedak pemutih dan krim penghilang noda pada wajah sudah umum digunakan oleh kaum perempuan baik di perdesaan maupun di perkotaan. Sementara penggunaan pengharum ruangan, pembersih kaca sebahagian besar dilakukan oleh penduduk di perkotaan. Untuk penggunaan pembasmi hama dan bahan beracun seperti sejenis baygon dan racun tikus sudah digunakan oleh penduduk pada umumnya, karena Kabupaten Kendari adalah daerah pertanian yang mempunyai areal persawahan yang luas dan merupakan daerah produksi beras terbesar untuk Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB 9.
LAIN-LAIN

<https://sulfur.com.go.id>

BAB 9. LAIN-LAIN

9.1 Kekerasan terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan bukanlah hal yang baru. Timbulnya berbagai macam bentuk kekerasan terhadap perempuan disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat maupun karena kejahatan moral. Bentuk-bentuk kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan terhadap perempuan antara lain adalah perkosaan, kekerasan dalam rumah tangga (kekerasan domestik) dan pelecehan seksual.

Pendeteksian kekerasan terhadap perempuan sangat sulit, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di dalam keluarga dimana sang istri tidak ingin masalah pribadinya diketahui umum. Perasaan malu yang menimpa dirinya membuatnya lebih baik berdiam diri. Lebih-lebih bila si korban merasa terancam jiwanya sehingga tidak mempunyai keberanian untuk melaporkan kejahatan yang dilakukan suaminya kepada pihak berwajib dalam hal ini ke kepolisian.

9.2 Korban Kekerasan

Berdasarkan data dari Polres Unaaha selama tahun 2002 di Kabupaten Kendari terjadi beberapa tindak kekerasan dimana korbannya adalah perempuan. Sebagian besar dari para perempuan tersebut (sekitar 75 persen) merupakan korban perkosaan, namun dari jumlah ini belum seluruhnya dilaporkan kepada kepolisian.

Di Kabupaten Kendari lembaga adat masih lebih berperan dalam menyelesaikan berbagai kasus yang ada dalam masyarakat. Peranan adat istiadat merupakan suatu hal yang sangat sakral dalam kehidupan masyarakat Suku Tolaki di Kabupaten Kendari. Bilamana terjadi suatu tindak kekerasan seperti pelecehan seksual maka penyelesaiannya dilakukan terlebih dahulu melalui prosesi adat, baru kemudian dilanjutkan sesuai ketentuan hukum agama sebelum dilaporkan kepada polisi.

Hal ini merupakan upaya untuk menghindari pertikaian dan perpecahan yang dapat menimbulkan mara bahaya dan pertumpahan darah, sehingga betapapun beratnya kasus tindak kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dapat diselesaikan melalui musyawarah adat. Dalam pelecehan seksual, sesuai ketentuan adat pihak keluarga laki-laki dikenakan suatu denda berupa uang tunai atau dalam bentuk barang, sebagaimana permintaan keluarga korban yang disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam adat itu sendiri dalam rangka penyelesaian kasus secara kekeluargaan (berdamai).

Tabel 9.1 Banyaknya Kekerasan Terhadap Perempuan menurut Jenis Kekerasan dan Jenis Kelamin Tahun 2002

Jenis Kekerasan	Jumlah
(1)	(2)
Majikan terhadap pembantu	-
Suami terhadap isteri	1
Kekerasan di tempat umum	2
Perkosaan	9
Jumlah	12

Sumber: Polres Unaaha

Tindak kekerasan lain yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan di Kabupaten Kendari adalah bentuk tindak pemerasan terhadap perempuan. Tindakan pelecehan kepada perempuan ini sudah sering dilakukan oleh penduduk laki-laki, seperti banyak perempuan usia muda (kawin) di Kabupaten Kendari yang menjadi TKW di luar negeri, dimana setiap bulan perempuan tersebut mengirimkan sebahagian penghasilan untuk keluarganya (suami dan anak) di daerah asalnya. sedangkan suami tadi hanya mengurus rumah tangga tanpa peduli untuk bekerja mencari penghasilan tambahan, dan ironisnya ada sebagian suami tersebut memanfaatkan penghasilan isterinya untuk mengurus perkawinan dengan perempuan lain (poligami).